

LMCK TW II

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024



DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Tujuan utama dari perencanaan yang baik adalah rendahnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh aktifitas transportasi dan angkutan jalan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam aktifitas transportasi dan angkutan jalan diakibatkan oleh berbagai sektor, yang meliputi Manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan atau mungkin sistem yang belum mendukung.

Untuk itu Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi dan angkutan jalan, peningkatan kepedulian masyarakat dalam hal keselamatan transportasi dan angkutan jalan, berbagai monitoring yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan angkutan jalan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW II ini merupakan salah satu tanggungjawab dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam hal transparansi baik finansial atau nonfinansial. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan di laporkan secara rinci. Sehingga dengan adanya laporan LMCK TW II ini akan diketahui sejauh mana penanganan kinerja bidang sarana dan keselamatan transportasi dan angkutan jalan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Tentu kami tidak bekerja sendiri dalam penanganan bidang sarana dan keselamatan transportasi dan angkutan jalan, ada berbagai pihak yang turut kami sertakan baik secara langsung atau pemikirannya. Besar harapan kami bahwa laporan ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan direktorat ini.

Terima kasih

Jakarta, Juli 2024

IR. DANTO RESTYAWAN, MT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN

DAFTAR ISI

2 KATA PENGANTAR

3 DAFTAR ISI

4 BAB I PENDAHULUAN

14 BAB II PERENCANAAN KINERJA

18 BAB III CAPAIAN KINERJA
TRIWULANAN

95 BAB IV PENUTUP



Bab I Pendahuluan dan Perencanaan Kinerja

Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW II
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

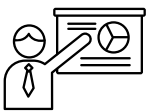
LATAR BELAKANG

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 Triwulan II yang merupakan tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2024. Pengukuran kinerja yang berbasis pada output maupun outcome merupakan hal yang sangat penting dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Laporan Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan menggambarkan secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan visi misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan LMCK Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 Triwulan II juga merupakan salah satu perwujudan tekad dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



TUPOKSI DIT. STJ

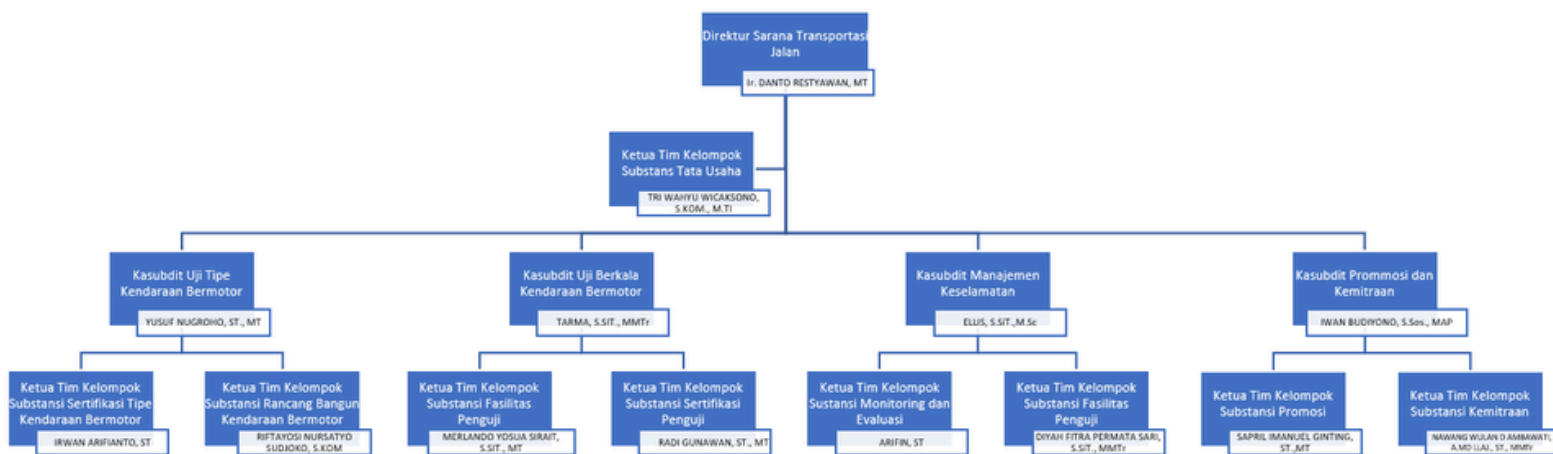
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

TUGAS

Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

FUNGSI

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan
- penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



STRUKTUR ORGANISASI DIT. STJ

SUMBER DAYA MANUSIA

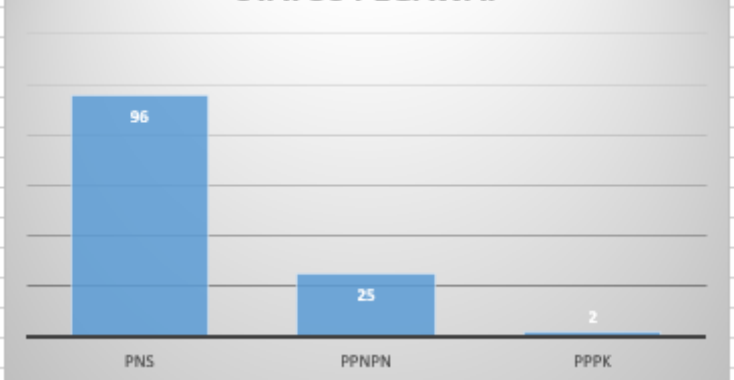


SDM Dit. STJ

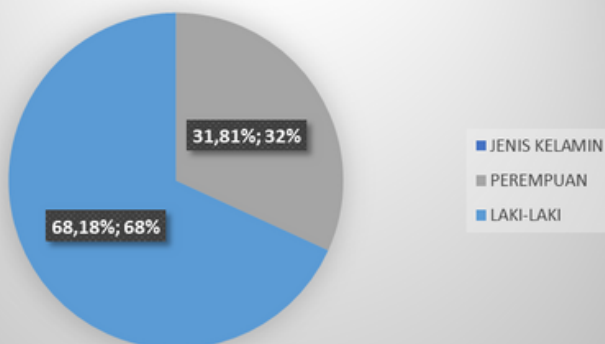
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebanyak 123 pegawai

123
pegawai

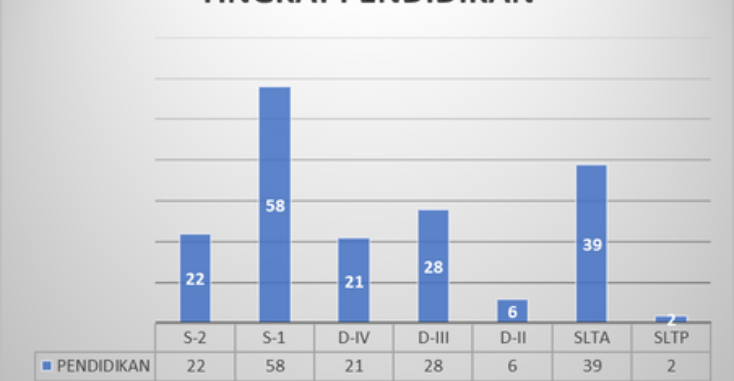
STATUS PEGAWAI



JENIS KELAMIN



TINGKAT PENDIDIKAN



Isu strategis dan permasalahan di bidang sarana transportasi jalan pada tahun 2024 antara lain terkait :

- **Permasalahan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum**

Kebijakan di bidang keselamatan antara lain mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Peraturan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ini selama ini terkendala dalam hal pengesahannya. Namun pada tanggal 18 Oktober 2020 telah selesai dan disahkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagai payung hukum untuk memastikan tata kelola keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum sesuai standar keselamatan yang telah diatur dalam peraturan tersebut

- **Over Dimensi dan Over Loading (ODOL)**

Permasalahan angkutan Over Dimension & Over Load (ODOL) di Indonesia terus-terusan berlanjut dan masih belum bisa dituntaskan. Truk ODOL logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung pada moda transportasi darat (truk). Karena moda transportasi lainnya seperti kereta api, angkutan laut dan udara belum mampu mengurangi beban dan transportasi darat.

Untuk mengendalikan angkutan barang muatan lebih atau overloading pemerintah memperkuat penyelenggaraan Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan over dimensi.

Ketidaksihinggaan kendaraan angkutan dengan kelas jalan yang ada juga akan menimbulkan beberapa potensi masalah diantaranya adalah :

- Potensi mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
- Potensi pelanggaran dari segi daya angkut, dimensi, tata cara muat serta kelengkapan surat- surat kendaraan dan pengemudi
- Potensi menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana jalan

- **Perkembangan Kendaraan Bermotor Listrik**

Presiden Joko Widodo saat ini telah menandatangani Perpres tentang mobil listrik yang memberikan harapan baru bagi pengembangan teknologi otomotif khususnya teknologi mobil listrik (electric vehicle) di Indonesia, hal ini merupakan lompatan kebijakan yang sangat strategis, sehingga patut diapresiasi karena akan memberikan dampak cukup luas bukan hanya pada pengembangan industri namun juga pada perbaikan kualitas emisi yang selama ini banyak dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor khususnya internal combustion engine baik gasoline maupun diesel engine.

Terbitnya perpres ini memberikan harapan maupun tantangan, diantaranya perkembangan teknologi baik komponen khususnya baterai dan motor listrik yang mampu menggerakkan industri nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa industri otomotif baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat atau lebih telah bergerak menjadi sebuah industri yang kompetitif melalui penguasaan dan pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan kendaraan listrik ini tentunya perlu diantisipasi, khususnya terkait dengan keselamatan penggunaan kendaraan. Semakin banyaknya jumlah kendaraan listrik akan meningkatkan paparan atas bahaya kecelakaan. Kendaraan listrik yang memiliki muatan baterai tegangan tinggi yang menyimpan daya di atas ambang batas yang dapat diterima manusia memiliki potensi bahaya, yaitu bahaya akibat adanya tegangan tinggi yang dapat memicu sengatan listrik, pelepasan panas, kebakaran dan lain-lain. Bahaya inilah yang perlu dimitigasi dan disiapkan regulasi tanggap daruratnya, agar tingkat keselamatan bagi penumpang, petugas tanggap darurat dan masyarakat sekitar tetap terjaga.

- **SDM Penguji Kendaraan Bermotor**

Permasalahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Di beberapa daerah masih banyak kompetensi penguji yang belum sesuai dengan jenis KBWU yang harus dilayani. Karena itu perlu percepatan untuk meningkatkan kompetensi penguji yang ada melalui Diklat atau Uji Kompetensi Naik Jenjang serta perekrutan tenaga penguji baru namun yang berasal dari lulusan D3 Penguji Kendaraan Bermotor.
2. Perlu peningkatan jenjang jabatan fungsional penguji dari jenjang jabatan fungsional keterampilan ke jenjang jabatan fungsional keahlian mengingat profesi penguji yang memiliki tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang besar dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan di jalan sehingga perlu didukung pula oleh tenaga-tenaga yang ahli bukan hanya sekedar oleh tenaga yang terampil. Selain itu dengan menjadi jabatan fungsional keahlian diharapkan dapat meningkatkan pula tunjangan jabatan bagi para penguji yang saat ini sudah tidak sesuai dan masih sangat minim dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan yang di hadapi oleh penguji.

- **Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Permasalahan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain :

1. Dari 471 UPUBKB di Indonesia, baru 358 UPUBKB yang terakreditasi dan dapat menyelenggarakan pengujian berkala secara mandiri, sehingga perlu percepatan atau peran serta dari pemerintah pusat agar dapat menghadirkan pelayanan pengujian berkala pada wilayah-wilayah yang belum terakreditasi. Salah satunya melalui mekanisme pengadaan alat uji keliling non statis yang diberikan kepada BPTD yang wilayah kabupaten/kota belum memiliki UPUBKB yang terakreditasi
2. Masih adanya kasus pungutan liar yang terjadi di daerah oleh petugas atau oknum penyelenggara pengujian berkala sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pimpinan UPUBKB.
3. Dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 dimana retribusi pengujian sudah tidak tercantum di dalam UU tersebut maka perlu segera menyiapkan langkah-langkah yang mendukung kebijakan tersebut agar pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang sudah ada di Indonesia tidak terganggu dalam pengoperasiannya yang tentunya walaupun dengan tidak adanya retribusi namun UPUBKB harus tetap dapat beroperasi/berjalan secara optimal untuk memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat.

adapun sistematika pelaporan yang terdapat di dalam Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan 2 (LMCK TW 2) diuraikan sebagai berikut :

Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar isi Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan dan Perencanaan Kinerja

- Latar Belakang
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Bagan Struktur Organisasi
- Sumber Daya Manusia
- Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- Sistematika Laporan
- Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab II Akuntabilitas Kinerja

- Tahapan Pengukuran Kinerja
- Pengukuran Capaian Kinerja

SP3 Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

IKP3 Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan -
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK09 Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK10 Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK11 Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

IKK12 Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

SP02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 01 Indeks RB Kementerian Perhubungan

- Definisi
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

- Realisasi Anggaran
 - Alokasi Anggaran Tahun 2020
 - Pagu Anggaran
 - Refocusing Anggaran Tahun 2021
 - Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021
 - Realisasi Anggaran Tahun 2021
 - Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
 - Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya
 - Hambatan dan Kendala

Bab III Penutup

- Penutup
- Ringkasan Capaian
- Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

- Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- Rencana Aksi Tahun 2024;
- Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;;
- Lain – lain yang dianggap perlu.

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Manajemen Keselamatan, Promosi dan Kemitraan,. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja keselamatan transportasi darat yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020 - 2024, maupun dalam Kebijakan Strategis Nasional bidang Transportasi Darat 2020 - 2024, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Sarana Transportasi Jalandalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 - 2024.

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024

NO	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	SP3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IKP1 Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,02	0,019	0,016	0,014	0,011
			IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	40	60	80	100	120
			IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	59	91	125	156	189
			IKK05 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	2	4	5	7	8
			IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	16.000	39.000	39.000	39.000	39.000
			IKK07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	3	6	10	14	17
2.	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	48	52	56	59	63
			IKK09 Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	20	22	24	26	28
			IKK10 Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	11	11	11	11	11
			IKK11 Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	593	623	654	686	740
			IKK12 Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jala	Orang	1.052	1.393	1.463	1.536	1.613
3.	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	86	87	88	89
4	SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP01 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78	79	79,5	80	80,5

URAIAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN TAHUN 2024

Sebagai tindak lanjut Dokumen Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024, perlu ditetapkan dokumen Rencana Kinerja setiap tahunnya. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 pada awal tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SP 03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,011
2	SK 03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 03	Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	120
			IKK 04	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	189
			IKK 06	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	39.000,00
			IKK 07	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	17
			IKK 08	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	63
			IKK 09	Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	28,000
			IKK 10	Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	11,000
			IKK 11	Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	740
			IKK 12	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1.613,000
3	SK 05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89,000
4	SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP01	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500

URAIAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran **Rp. 136.694.440.000,-** adalah sebagai berikut:

4

Tabel Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan (Awal)

NO		Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
1	SP3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	0,008	Persen
2	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Transportasi Darat	2	Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	200	Perusahaan
			3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	422	Lokasi
			4	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	20.000,00	Orang
			5	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	8	Unit
			6	Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	68	Persen
			7	Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	10	Dokumen
			8	Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	12	Draf
			9	Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	134	Sertifikat
			10	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	1.361,00	Orang
3	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	11	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	89	Nilai
4	SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	12	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,5	Nilai

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 6.000.000.000
2	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 117.423.508.000
3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 495.800.000
4	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 12.775.132.000



Bab II Akuntabilitas Kinerja

Laporan Monitoring Capaian Kinerja TW II Tahun 2024
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-Performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Capaian Indikator
Kinerja Kegiatan

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Prosentase Capaian Indikator
sasaran Kegiatan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK dalam Sasaran a}}{\text{Total jumlah rencana/target IK dalam Sasaran a}} \times 100 \%$$

Rata-rata nilai capaian seluruh
IK yang dilaksanakan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK}}{\text{Total jumlah rencana/target IK}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 hasil pengukuran kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dan bertujuan untuk mewujudkan empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024.

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi E-Performance yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Capaian Indikator
Kinerja Kegiatan

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Prosentase Capaian Indikator
sasaran Kegiatan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK dalam Sasaran a}}{\text{Total jumlah rencana/target IK dalam Sasaran a}} \times 100 \%$$

Rata-rata nilai capaian seluruh
IK yang dilaksanakan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK}}{\text{Total jumlah rencana/target IK}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 hasil pengukuran kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dan bertujuan untuk mewujudkan empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kinerja sampai dengan bulan Juni 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan maka di peroleh data capaian kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan adalah pada table berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 Triwulan II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	TW 1		
					T	R	C
1	SP 03	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi					12,50%
		IKP 01 Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Rasio	0,008	0,008	0,015	12,50%
2	SK 03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					71,78%
		IKK 03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)	Perusahaan	200,000	200,000	175	87,50%
		IKK 01 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	122,000	122,000	332	78,67%
		IKK 06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	20000,000	20000,000	1.986	9,93%
		IKK 07 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar Internasional (UN-ECE)	Unit	8,000	8,000	8	100,00%
		IKK 08 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	68,000	68,000	60,84	102,71%
		IKK 09 Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	10,000	10,000	0	87,50%
		IKK 10 Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	12,000	12,000	9	75,00%
		IKK 11 Jumlah Sertifikasi Penjual Kendaraan Bermotor	Sertifikat	131,000	131,000	0	0,00%
		IKK 12 Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1361,000	1361,000	1425	104,70%
3	SK 05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100,00%
		IKK 1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	89,000	89,000	87	100,00%
4	SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					98,79%
		IKP01 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	80,500	77,45	98,79%

Selama tahun 2024, ada 4 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan yaitu :

1. **SP3 - Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi**
2. **SK3 - Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat**
3. **SK5 - Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**
4. **SP02- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**





SP3

Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan keselamatan transportasi darat. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi yang merupakan sasaran program di Unit Eselon I dan Kementerian Perhubungan. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKP1

Rasio Kejadian Kecelakaan
Transportasi Jalan per 10.000
Keberangkatan

IKP1

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

REALISASI 2024

3

CAPAIAN KINERJA

12,50%

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan yang dilakukan investigasi oleh KNKT. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN.

Pencapaian Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang diukur dengan indikator IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan. Adapun capaian Triwulan II tahun 2024 IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Per 10.000 Keberangkatan sebagaimana tabel berikut :

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SP03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi			
IKP01	Rasio Kejadian Kecelakaan	Satuan :	Ratio	
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Y2024
Target		0,008	0,008	0,008
Realisasi		0,00	0,015	0,015
Capaian		200,00%	12,50%	12.50%

Sumber: Data Kecelakaan Bus AKAP dan Bus Perintis (KNKT), Data Keberangkatan Bus AKAP (Dit. Prasarana Transportasi Jalan), Data ritase Bus Perintis (Dit. Angkutan Jalan), dioalah kembali oleh Dit. Sarana Transportasi Jalan

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Realisasi IKP1

$$\text{Realisasi IKP1} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkiuatn Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

Keterangan :

Jumlah kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2024.

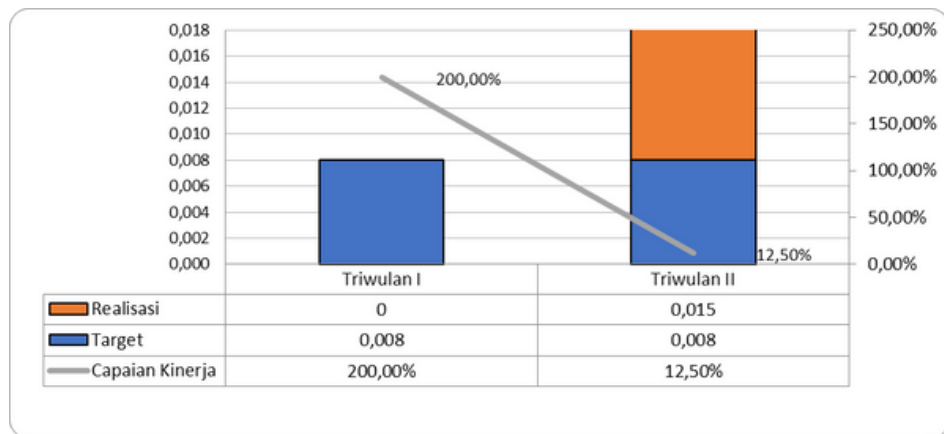
- o Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis diperoleh dari koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
- o Data kecelakaan yang melibatkan AKAP dan/atau Angkutan Perintis adalah data kecelakaan yang menonjol yang menyebabkan korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang yang didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan dan dapat diakses pada situs <http://knkt.go.id/>.

Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan/atau Angkutan Perintis di Jalan pada tahun (n), dimana (n) merupakan periode pada tahun berjalan yaitu tahun 2024.

- o Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan AKAP di terminal dan data realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan jalan pada tahun (n).
 - Data realisasi keberangkatan AKAP diperoleh dari Aplikasi SIASATI yang dapat diakses melalui website <http://siasati.dephub.go.id>
 - data realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan jalan diperoleh melalui koordinasi antara Directorates Angkutan Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Perum DAMRI.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Realisasi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2024 sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 0,008 maka capaian kinerja mencapai 12,50% Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut :



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan :

- UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kronologi Target

Pada tahun 2024, target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2024 ditargetkan 0,008 yang diperoleh dari angka capaian realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 0,008 dan merupakan target yang disampaikan oleh Pimpinan.

Pada periode sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, berdasarkan data yang dihimpun dari website Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) <http://knkt.go.id/>, kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis adalah sebanyak **3 (tiga) kejadian** kecelakaan. Kendaraan bus AKAP dan Bus Perintis yang terlibat kecelakaan.

Jumlah Investigasi
Kecelakaan oleh
KNKT sampai
dengan Juni 2024

3

Kejadian
kecelakaan

Sedangkan, jumlah keberangkatan bus di Terminal Penumpang Tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi angkutan keperintisan pada periode Januari sampai dengan September Tahun 2024 sebanyak **1.985.384 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat)** keberangkatan dengan rincian:

- Jumlah keberangkatan **Bus AKAP** periode Januari – juni 2024 sebanyak **1.955.227 (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh)** keberangkatan, dan
- Jumlah keberangkatan **Bus Perintis** periode Januari – Juni 2024 sebanyak **30.157 (tiga puluh ribu seratus lima puluh tujuh)** keberangkatan.

Jumlah Keberangkatan Bus AKAP dan Bus Perintis sampai dengan Juni 2022

1.985.384

1.955.227 Bus AKAP
30.157 Bus Perintis

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah Keberangkatan (Kumulatif)
		Triwulan II
1	Bus AKAP	1.955.227
2	Bus Perintis	30.157
Total		1.985.384

Perhitungan Realisasi IKP1

Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)

= $\frac{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah Keberangkatan}}$ x 10.000

$$IKP\ 1 = \frac{3}{1.985.384} \times 10.000 = 0,015$$

Berdasarkan perhitungan realisasi indikator kinerja program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Triwulan II Tahun 2024, didapatkan hasil rasio 12,50%.

Faktor Keberhasilan Kinerja

Pada Triwulan II tahun 2024, Direktorat Sarana Transportasi Jalan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya pelaksanaan Pembinaan Teknis Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum di seluruh Indonesia dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan Angkutan Umum
2. Pelaksanaan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan
3. Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP maupun Angkutan Barang
4. Adanya Sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan melalui berbagai media
5. Regulasi di bidang keselamatan transportasi jalan yang sudah mengalami peningkatan penataan
6. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)
7. Adanya Sosialisasi keselamatan jalan yang dilakukan melalui berbagai media

Faktor Kendala Kinerja

Beberapa faktor kendala yang menghambat pencapaian Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan pada Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) masih sangat sedikit, sampai September tahun 2024 sebanyak 175 perusahaan yang memiliki Sertifikat SMK dari kurang lebih 31.657 perusahaan angkutan umum. Hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masing sangat rendah dan dianggap tidak penting. Selain itu, minimnya SDM Penilai Dokumen SMK PAU juga menyebabkan kurangnya kesiapan dari Instansi Perhubungan untuk melakukan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan angkutan umum.
2. Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum.
3. Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keselamatan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah *at cost* bagi perusahaan itu sendiri.
4. Masih belum adanya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas.
5. Masih ditemukan banyaknya SRUT yang tidak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Realisasi pencapaian kinerja semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IKP 1} = \frac{(\text{Target 2024} - (\text{Realisasi 2024} - \text{Target 2024}))}{\text{Target 2024}} \times 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$IKP 1 = \frac{3}{1.985.384} \times 10.000 = 0,015$$

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKP01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	0,008	0,00	200,00%	0,008	0,015	12,50%

Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada angkutan bus AKAP dan Perintis.

Untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP dan bus perintis, antara lain:

Kebijakan atau regulasi

- Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK.

Sosialisasi

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll);
- Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan.

Implementasi atau Penyelenggaraan

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
- Melaksanakan *Training Of Trainer* (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU.
- Melaksanakan *Ramp Check* Angkutan Umum;
- Melaksanakan Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan;
- Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan terkait Harmonisasi RUNK LLAJ;
- Melaksanakan Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Umum;
- Melaksanakan Ketahanan Uji Guling pada Kendaraan Bus.

Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan;
- Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3);
- Monitoring dan Evaluasi perusahaan karoseri produksi kendaraan bermotor;
- Monitoring SRUT.

Teknologi Informasi

- Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- Integrasi aplikasi rampcheck dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.

Koordinator atas Indikator Kinerja - Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Hubdat dengan dibantu oleh Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Ditjen Hubdat. Adapun anggaran kegiatan terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2024 yaitu senilai **Rp6.203.400.000,-** dan sampai dengan bulan Juni tahun 2024 realisasi anggaran senilai **Rp1.910.263.322,-** atau sebesar **30,79%**. Kegiatan yang mendukung tercapai Indikator Kinerja Program tersebut dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Keterangan
1	Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan	Rp400.000.000	Rp192.528.390	48,13%	
2	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor	Rp400.000.000	Rp0	0,00%	
3	Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Rp307.000.000	Rp0	0,00%	
4	Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp400.000.000	Rp0	0,00%	
5	Inspeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru (Rampcheck)	Rp427.400.000	Rp247.086.779	57,81%	
6	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang	Rp442.000.000	Rp235.975.208	53,39%	
7	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	Rp500.000.000	Rp254.542.370	50,91%	
8	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp500.000.000	Rp192.462.900	38,49%	
9	Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Rp350.000.000	Rp142.432.425	40,69%	
10	Program Aksi Keselamatan Berkendara	Rp470.000.000	Rp252.559.000	53,74%	
11	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	Rp490.000.000	Rp47.175.000	9,63%	
12	Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan	Rp400.000.000	Rp142.496.250	35,62%	
13	Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum)	Rp500.000.000	Rp0	0,00%	
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Rp340.000.000	Rp155.830.000	45,83%	
15	Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNK	Rp277.000.000	Rp47.175.000	17,03%	
TOTAL		Rp6.203.400.000	Rp1.910.263.322	30,79%	

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampcheck angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Kebijakan atau regulasi

- Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada perusahaan angkutan umum terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum;
- Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum;
- Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan.

2. Sosialisasi

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll);
- Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awarness masyarakat terhadap keselamatan jalan;
- Sosialisasi terkait Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kepada Pemerintah-pemerintah daerah.

3. Implementasi atau Penyelenggaraan

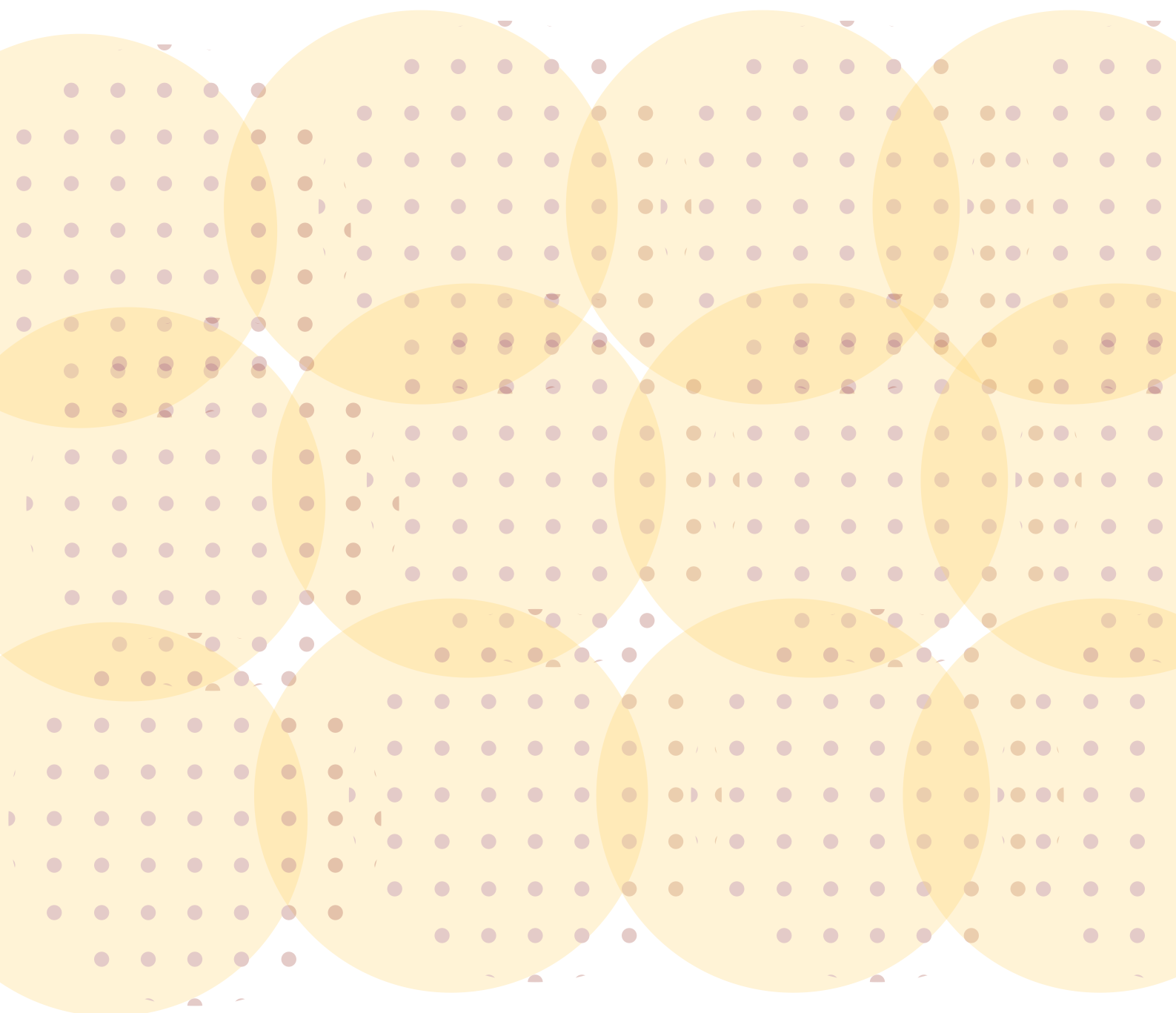
- Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengelola Transportasi Darat, staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan dan Dinas Perhubungan Provinsi Seluruh Indonesia;
- Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum;
- Melaksanakan *Training Of Trainer* (TOT) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;
- Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum;
- Melaksanakan Pembinaan Teknis tentang manajemen batas kecepatan kepada perusahaan angkutan umum dan Dinas Perhubungan daerah.
- Melaksanakan Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan yang mana merupakan harmonisasi terhadap RUNK LLAJ.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan;
- b. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3) yang telah dinyatakan lulus Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

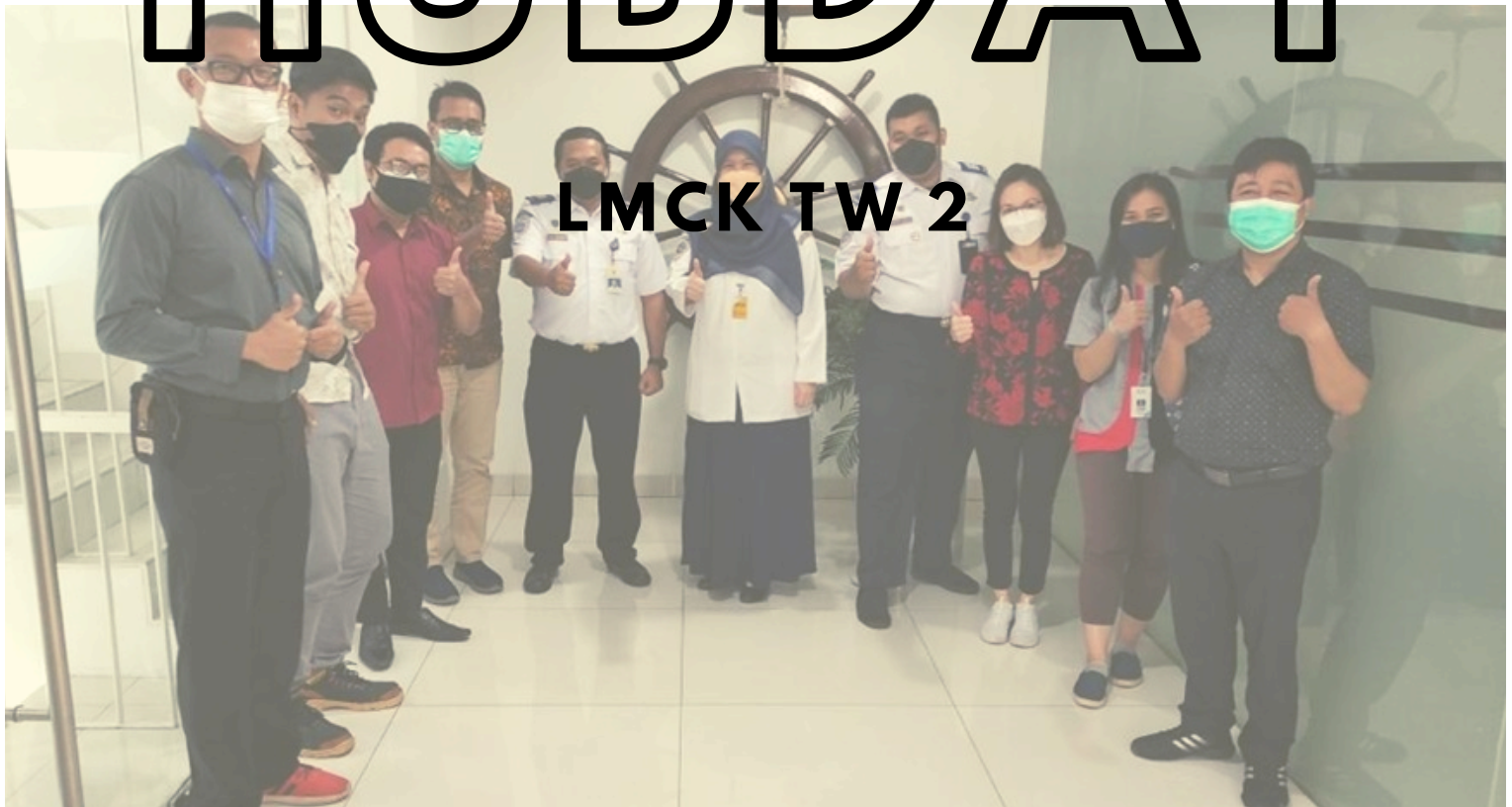
5. Teknologi Informasi

- a. Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum Elektronik Sistem Manajemen Keselamatan (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perizinan Online Angkutan dan Multimoda (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal;
- b. Optimalisasi aplikasi *Terminal Online Sistem* (TOS) untuk pengawasan keberangkatan bus AKAP di terminal;
- c. Integrasi aplikasi rampcheck dengan aplikasi TOS dan SPIONAM sehingga mempermudah dalam pelaksanaan inspeksi keselamatan pada kendaraan angkutan umum.





STJ HUBDAT



LMCK TW 2



SK4

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan keselamatan transportasi darat. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat . Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) **(IKK03)**
2. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional **(IKK04)**
3. Jumlah ketersediaan taman edukatif **(IKK05)**
4. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan **(IKK06)**
5. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) **(IKK07)**
6. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor **(IKK08)**
7. Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK09)**
8. Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK10)**
9. Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor **(IKK11)**
10. Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan **(IKK12)**

IKK03

Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Sarana Transportasi Jalan pada IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK), dapat dilihat pada tabel di samping ini

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		
IKK 3	Jumlah Perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan SMK	Satuan :	Perusahaan
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2
Target		200	200
Realisasi		161	175
Capaian		80,50%	87,50%

Sumber: Data Rekapitulasi Dit. Sarana Transportasi Jalan

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian IKK03 = Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang menerapkan SMK sampai dengan tahun (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu tahun 2024

Jumlah Perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sampai dengan Juni 2024 sebanyak 175 Perusahaan maka realisasi IKK03 pada TW II adalah sebagai berikut:

REALISASI IKK03 TW II = 175

60 Perusahaan
Angkutan
Orang

115 Perusahaan
Angkutan
Barang

175 PERUSAHAAN

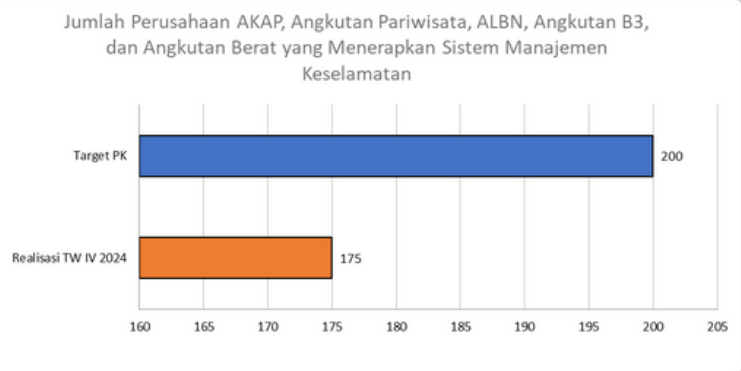
1. PT. BIMA SUCI JAYA AGUNG
2. PT. DEWI PUTRI NASIMA
3. PT. EKA MIRA PRIMA SENTOSA
4. PT. GUNUNG HARTA TRANSPORT SOLUTIONS
5. PT. HARYANTO MOTOR INDONESIA
6. PT. HIBA UTAMA
7. PT. HS BUDIMAN 45
8. PT. KRAKATAU ARGO LOGISTICS
9. PT. LANGSUNG LANCAR CEMERLANG
10. PT. SAHABAT KITA SEJATI
11. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU
12. PT. SINAR JAYA MEGAH LANGGENG
13. PT. SINAR MAS TRANSPORT
14. PT. TEGUH MUDA ABADI
15. PT. INDO TRANSPORT ABDIMAS
16. PT. MANUPPAK ABADI
17. PT. INDOSTAR CARGO
18. PT. SETIA NEGARA
19. PT. HIDUP BARU PUTRA
20. PERUM DAMRI
21. PT. GILANG SEMBILAN SEMBILAN
22. PT. ELNUSA PETROFIN
23. PT. PRASADHA PEMUNAH LIMBAH INDUSTRI
24. PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA
25. PT. SINAR JAYA LANGGENG UTAMA
26. PT. HANOMAN SAKTI PRATAMA
27. PT. MURNI ANUGRAH JAYA USAHA
28. PT. ASLI PRIMA INTI KARYA
29. PT. GARUDA MAS PUTERA ESA
30. PT. SUMBER WARAS PUTRA
31. PT. LADJU SRIKANDI MANDIRI
32. PT. PUNINAR FUELLER
33. PT. DAKOTA LOGISTIK INDONESIA
34. PT. EFISIENSI PUTERA UTAMA
35. PT. SUMA ADI JAYA
36. PT. DINAMIKA MAKMUR SENTOSA
37. PT. PUNINAR JAYA
38. PT. GONDO INTI PERSADA
39. PT. LADJU SENTOSA MANDIRI
40. PT. PROLINK
41. PT. NUSATAMA INDOTAINER
42. PT. PRIMAJASA PERDANA RAYA UTAMA
43. PT. LOOKMAN DJAJA
44. PT. MULTIPRIMA USAHATAMA
45. PT. AUDRI LUTFIA JAYA
46. PT. BATUTA EKSPEDISI LOGISTIK
47. PT. CIPTA KRIDA BAHARI
48. PT. BUANA CENTRA SWAKARSA
49. PT. KALISARI CITRA JAYA
50. PT. EWAY ALLIANCE INDONESIA
51. PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA
52. PT. LINTAS BUANA KASEI
53. PT. MEGA SAMUDRA TAMA
54. PT. SCG BARITO LOGISTIC
55. PT. CITRA TRANSPORT LOGISTIC
56. PT. MAJU ASRI JAYA UTAMA

57. PT. BERKAT JAYA SUKSES
58. PT. UNITED AUTO MOBIL SEMBILAN PULUH UTAMA
59. PT. SUMBER ALAM EXPRESS
60. PT. KARYA TUBAN CEMERLANG
61. PT. HAZMAT TECHNO INDONESIA
62. PT. KHARISMA MULIA ABADI CEMERLANG
63. PT. TECH LOGISTIK INDONESIA
64. PT. INSPIRED SINAR ABADI
65. PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS
66. PT. INDOWASTEK
67. PT. RIZKY PUTRA 168
68. PT. TRANSWASTE MODA INDONESIA
69. PT. KITA MANDIRI ABADI
70. PT. TRIATRA MULIA INDONESIA
71. PT. WASTEC INTERNASIONAL
72. PT. SAN PUTRA SEJAHTERA
73. PT. GLOBAL BORNEO TRANSPORT
74. PT. GALATAMA NUANSA TOUR
75. PT. NANDA PERSADA TRANSPORT
76. PT. NANDA PERSADA SENTOSA
77. PT. TARUNA MITRA NUSANTARA
78. PT. LINTAS HARAPAN MANDIRI
79. PT. JAYA JAGAT RAYA
80. PT. KARYA SETIAWAN EKATAMA
81. PT. SUMBER ANUGRAH ENERGY
82. PT. ANUGERAH RESKI UTAMA ZANGATTA
83. PT. DOHOT ALAM SEJAHTERA
84. PT. SARANA PUTRA DAERAH
85. PT. JACKAL HOLIDAYS
86. PT. BIMA INTI GLOBAL
87. PT. ARIMBI JAYA AGUNG
88. PT. PETRO UTAMA ENERGI
89. PT. RUSLI JAGAT UTAMA
90. PT. JASA MEDIVEST
91. PT. DUNIA EXPRESS TRASINDO
92. PT. PETROLIN NIAGA ENERGI
93. PT. SINAR ANUGERAH BATTERY
94. PT. ARK LOGISTICS & TRANSPORT
95. PT. SUMBER ADI MULYO TULUNGAGUNG
96. PT. SUNGAI BUDI
97. PT. TRANS DARPI INDONESIA
98. PT. DAME ALAM SEJAHTERA
99. PT. MEGA TRANS ENERGI
100. PT. DELAPAN DELAPAN HIJAU LESTARI
101. PT. TRANSINDO PERKASA PRIMA
102. PT. ISKANDAR SARI ANDALAS
103. PT. ANDALAN NUSA PRATAMA
104. PT. JABAR LAJU TRANSINDO
105. PT. PUTRA DAERAH MANDIRI JAYA
106. PT. DONGAN ALAM SEJAHTERA
107. PT. SUMBER LOGAM JAYA
108. PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA
109. PT. CLP INDONESIA
110. PT. RYANTA MITRA KARINA
111. PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT
112. PT. SURYA PURNAMA SEMESTA
113. PT. JATIM PETROLEUM TRANSPORT
114. PT. RAMA MANUNGGAL PERKASA
115. PT. GALUH INTI BAHARI
116. PT. SAROHA TRANSPORT ABADI

117. PT. PRASADHA ANEKA LIMBAH INDONESIA
118. PT. TRANS LJA BEKASI
119. PT. SARI GEDE PUTRA BANGSA
120. PT. HAMMAMI JAYA SAMUDRA
121. PT. MUNASINDO MANDIRI SEJAHTERA
122. PT. SUMBER BERKAT JAYA MANDIRI
123. PT. SURYA PUTRA ANUGERAH
124. PT. PANDAWA WOLU PITU
125. PT. RAJAWALI BUS TRANSPORT
126. PT. SUBUR JAYA MANDIRI BERSAMA
127. PT. PANDAWA 87
128. PT. KENCANA PESAKA ABADI
129. PT. GUNTUR MADU PUTRA
130. PT. PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI
131. PT. STLI (SEMESTA TRANSPORT LIMBAH INDUSTRI)
132. PT. AWAL BROS MULTIKARYA
133. PT. BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE
134. PT. FADILLAH BAROKAH SUMUT
135. PT. AMINDY BAROKAH
136. PT. SINAR SURYA MAJU SENTOSA
137. PT. INO ALAM NUSA
138. PT. MULTI HANNA TRANSPORINDO
139. PT. WIRA INNO MAS
140. PT. MUSIM MAS
141. PT. INTI BENUA PERKASATAMA
142. PT. AGRO MAKMUR RAYA
143. PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR
144. PT. GARIN CITRA MANDIRI
145. PT. INTI KALIASIN
146. PT. MITRA JAYA PERTIWI
147. PT. BINTANG ESTU TERANG
148. PT. ANUGERAH KARYA UTAMI GEMILANG
149. PT. AGUNG JAYA SEMESTA
150. PT. JAYA GEMILANG MANDIRI
151. PT. ARISTA ONION TRANSPORT
152. PT. LANA JAYA PRIMA
153. PT. LINTAS USAHATAMA TRANS
154. PT. SWARNA BHAKTI KARYA
155. PO. KONCODEWE PARIWISATA TEMAN
156. PO. DJOKO KENDIL
157. PT. KARYA UTAMA GEMILANG
158. PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
159. PT. PRASADHA ANEKA LIMBAH INDONESIA
160. PT. BIG BIRD PUSAKA
161. PT. MULTI HANNA KREASINDO
162. PT. EMKL JAKARTA MAJU PUSAKA
163. PT. SERASI LOGISTICS INDONESIA
164. PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGOLAHAN AIR LIMBAH JAYA (PALJAYA)
165. PT. RODO GIRA PUTRA MANDIRI
166. PT. HARAPAN JAYA PRIMA
167. PT. SAHALA MAKMUR PERSADA
168. PT. ANEKA KARYA LESTARI
169. PT. CANAMAS ANTAR NUSA
170. PT. CITRA DEWI TRANSPORT
171. PT. GLOBAL ANUGERAH MANDIRI
172. PT. PUTERA BAJA TUNGGAL
173. PT. IKAN DORANG TRANS
174. PT. TIRTO AGUNG
175. PT. PRIMA AGUNG DIAN LANGGENG

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Direktorat Sarana TJ Tahun 2024

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024 Realisasi Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2024 pada periode TW II adalah sebanyak **175 perusahaan angkutan umum** yang telah menerapkan SMK pada perusahaannya. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebanyak **200 perusahaan** maka capaian kinerja mencapai **87,50%** Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK03 Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2024



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan :

1. PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ
2. peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang RUNK LLAJ
3. PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
4. KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
5. KP-DRJD 1913 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penilai SMK PAU

Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2024 adalah sebanyak 175 perusahaan angkutan umum yang telah menerapkan SMK yang terdiri dari 60 perusahaan angkutan orang dan 115 perusahaan angkutan barang. Data ini didapatkan dari hasil penilaian dokumen SMK oleh

Saat ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan, melalui Subdit Manajemen Keselamatan terus berupaya dan mendorong perusahaan angkutan umum untuk menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan sebagai komitmen mewujudkan keselamatan dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan adanya Sistem E-SMK diharapkan banyak perusahaan yang mulai menerapkan SMK PAU. Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Jumlah Perusahaan AU yg Menerapkan SMK s.d tahun (n)}}{\text{Target tahun (n)}} \times 100\%$$

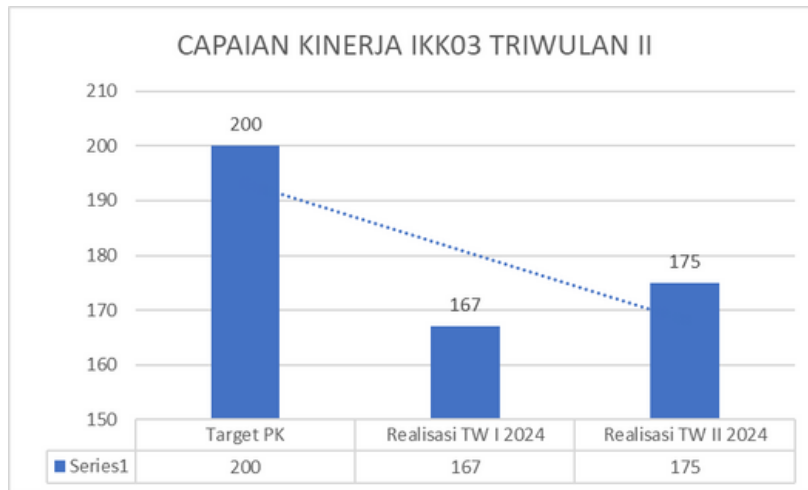
tahun (n) = Tahun berjalan yaitu 2024

$$\% \text{ Capaian} = (175/100) \times 100\% = 87,50\%$$

Capaian Kinerja TW II
terhadap Target
Kinerja

87,50%

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKK03	Jumlah Perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan SMK	200	167	83,5%	200	175	87,50%



Realisasi Indikator Kinerja Triwulan II Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan adalah sebanyak 175 perusahaan atau sebesar 87,50%.

Belum tercapainya indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2023 antara lain yaitu masih banyaknya perusahaan angkutan umum yang belum terlalu paham mengenai penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum sehingga sampai saat ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan terus mendorong dan mensosialisasikan tata cara penyusunan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum kepada Perusahaan-perusahaan angkutan umum. faktor lain yang mempengaruhinya yaitu terdapat 10 elemen yang harus di penuhi oleh perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum namun masih banyak perusahaan yang masih belum bisa memenuhi 10 elemen tersebut sehingga proses penyusunan dokumen menjadi terhambat. Terdapat kendala dalam proses sertifikasi terhadap perusahaan dikarenakan anggaran yang terkena blokir. Dalam kegiatan sertifikasi terdapat tahapan Monitoring yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengecekan secara langsung ke lapangan dengan keluarannya merupakan Berita Acara untuk mengajukan Sertifikat serta SK kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Subdit Manajemen Keselamatan telah memaksimalkan SDM untuk melaksanakan monitoring dengan anggaran yang tersedia yaitu dengan membagi 1 (satu) Tim untuk melaksnaakan monitoring kepada 3 - 4 perusahaan dalam waktu sekitar 3 (tiga) hari disesuaikan dengan wilayah terdekat antar alamat Perusahaan Angkutan Umum.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)
2. Pembekalan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum
3. Memaksimalkan SDM dengan anggaran yang tersedia yaitu dengan melaksanakan monitoring secara bersamaan kepada perusahaan yang berada di wilayah yang bedekatan oleh 1 (satu) Tim.
4. Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU).

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	350.000.000	350.000.000	142.432.425	40,69%
Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum	500.000.000	500.000.000	192.462.900	38,49%
Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK-PAU	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
JUMLAH	1.350.000.000	1.350.000.000	334.895.325	24,81%



Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang hal-hal yang akan dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) dan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum kepada perusahaan angkutan umum dalam Menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum, melaksanakan monitoring pembinaan keselamatan angkutan umum.

Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertujuan agar sumber daya manusia untuk penilai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertambah banyak sehingga penilaian dokumen SMK dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih cepat dengan sumber daya manusia yang berkompeten.

Seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum maka Kegiatan Pembinaan Teknis penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum perlu dilaksanakan sehingga manajemen keselamatan dan pengelolaan resiko kecelakaan dalam suatu perusahaan dapat terwujud dan timbulnya kesadaran suatu perusahaan mengenai pentingnya keselamatan.

IKK04

Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di jalan nasional

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Sarana Transportasi Jalan pada IKK04 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di jalan nasional, dapat dilihat pada tabel di samping ini

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM					
SK04	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK04	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Satuan:	Lokasi		
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Y2023
Target		313	313	313	313
Realisasi		283	303	303	303
Capaian		90,42%	96,81%	96,81%	96,81%

Indikator Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan dilakukan oleh BPTD dan untuk pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK04} = \frac{\text{Jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional sampai dengan tahun ke (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu Tahun 2024.}}{\text{Jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional sampai dengan tahun ke (n), dimana (n) merupakan periode tahun berjalan yaitu Tahun 2024.}}$$

Pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sampai dengan Juni 2024 adalah sebanyak **24 titik Lokasi** sehingga capaian kinerja IKK04 TW II adalah sebagai berikut :

$$\text{IKK04} = \text{Jumlah s.d 2023} + \text{Realisasi TW II Tahun 2024}$$
$$\text{IKK04} = 308 + 24 = 332 \text{ Lokasi}$$

REALISASI TW II

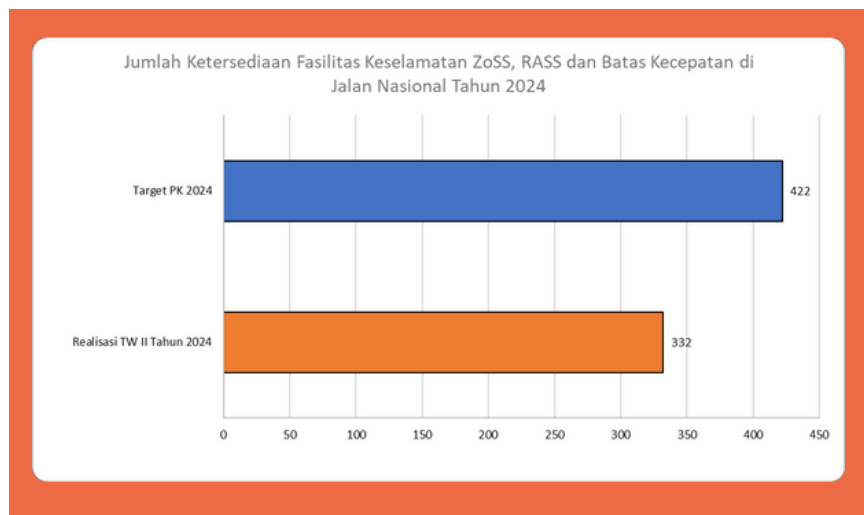
332
Lokasi

Catt. Baseline Tahun 2023 dengan Jumlah Total pembangunan sebanyak 308 Lokasi

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional dari hasil monitoring pembangunan ZoSS, RASS dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD pada tahun 2022 pada Triwulan II terdapat **24 (dua puluh) titik** lokasi yang sudah selesai pembanguan di BPTD Kelas II Bali dan Sualawesi Tenggara.

Sehingga pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan sampai dengan tahun 2024 pada Triwulan II adalah sebanyak **332 lokasi**. Jika dibandingkan dengan Target PK 2024 sebanyak 3422 lokasi maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional Tahun 2024 pada Triwulan II.



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Dalam rangka mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional Direktorat Sarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan:

1. PM 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
2. PM 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
3. SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun sampai dengan tahun 2024 Triwulan II adalah sebanyak 332 lokasi.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan yang telah terbangun di jalan nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 78,67%. Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja TW II terhadap Target Kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Kumulatif Pembangunan Sampai Tahun Ke (n)}}{\text{Target Perjanjian Kinerja Tahun Ke (n)}}$$

$$\% \text{ Capaian} = (332/422) \times 100\% = 78,67\%$$

Capaian Kinerja TW II
Tahun 2024 terhadap
Target Kinerja

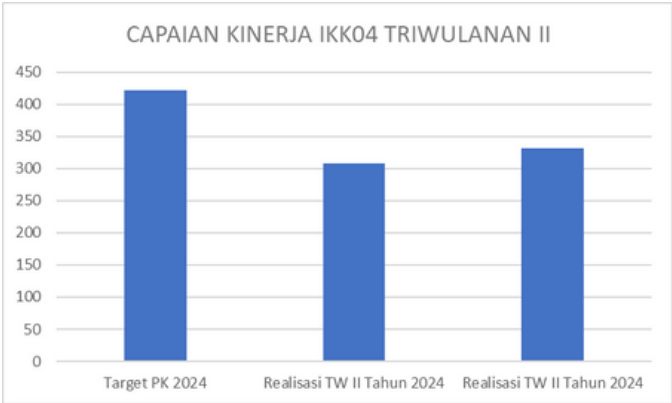
78,67%

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2024 sebesar 78,67% dari target PK 2024.

Kode	Indikator	TW I			TW II		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKK04	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan	422	308	72,99%	422	332	78,67%

Capaian Indikator Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun di jalan nasional dengan capaian pada periode Triwulan II yaitu 332 Lokasi.

Faktor belum tercapainya keberhasilan jumlah pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan dikarenakan adanya pemotongan/refocusing anggaran yang berpengaruh pada proses kontraktual pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan di masing-masing BPTD dengan terhambatnya proses kontraktual maka kegiatan pembangunan belum dilaksanakan,



Dan selain hal tersebut terdapat beberapa pembangunan fasilitas keselamatan yang awalnya direncanakan pada Tahun 2024 menjadi dihapuskan karena Automatic Adjustment . Tahun anggaran 2024 terdapat 4 (empat) BPTD yang terkena Automatic Adjustment yaitu BPTD Kelas II Sumatera Barat, BPTD Kelas II Jambi, BPTD Kelas II Sulawesi Tengah dan BPTD Kelas II Papua Barat. Adapun jumlah keseluruhan anggaran terkait indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2024 yaitu senilai **Rp300.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp0,-** atau sebesar **0%**.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan BPTD serta peran aktif BPTD untuk melakukan inventarisasi lokasi pembangunan ZoSS, RASS, Batas Kecepatan, melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan kepada BPTD, serta Sosialisasi ZoSS dan RASS Keselamatan Jalan.

Selain kegiatan diatas Direktorat Sarana Tranportasi Jalan melalui Subdit Manajemen Keselamatan sedang membuat aplikasi SiEmka yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pengawasan dan perencanaan pembangunan ZoSS, RASS, dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD sehingga data yang disajikan lebih akurat dan terdigitalisasi. progres pembangunan Siemka sampai saat ini yaitu telah dilaksanakan User Accetance Test (UAT), dan pada saat ini sedang dalam proses perbaikan atau penyempurnaan dari User Accetance Test (UAT).



IKK 06

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM							
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
IKK6	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Satuan : Orang					
Target/Realisasi/Capaian		2023	2024	Q1	Q2	Q3	Q4
Target		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Realisasi		29.723	1.986	1.476	1.986	-	-
Capaian		148,00%	9,93%	7,4%	9,93%	0%	0%

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK06 = \frac{\text{jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun (n)}}{\text{jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2024 triwulan 1}}$$

jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2024 triwulan 1 adalah sebanyak 1.986 orang hal ini karena belum terlaksana Rangkaian dan Puncak Pekan Keselamatan Jalan (PKJ) di 35 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). maka realisasi Kinerja untuk Indikator IKK06 adalah sebagai berikut :

$$IKK06 = 1.986 \text{ Orang}$$

Realisasi TW II



1.986
Orang

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Pada triwulan II Capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan adalah 1.986 orang Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebanyak 20.000 orang maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK06 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024.



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan merupakan tindak lanjut dari Seruan PBB dalam Resolusi No. A/Res/74/299. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2024 triwulan II adalah sebanyak 1.986 orang hal ini didapatkan dari hasil pelaksanaan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan yang dilaksanakan pada kegiatan Sosialisasi Keselamatan Jalan Sadar Usia Dini dan Car Free day . Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Pada Tahun 2024, Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Pusat dan Pekan Keselamatan Jalan di Balai Pengelola Transportasi Jalan dilihat akan mengalami peningkatan dan pemerataan penyelenggaraan karena Tahun 2024 BPTD kelas II dan III melaksanakan PKJ dengan jumlah 33 BPTD di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = 1.986 / 20.000 \times 100 \% = 9,93\%$$

Capaian Kinerja
TW II terhadap
Target Kinerja

9,93%

Kode	Indikator	TW I			TW II		
IKK6	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		20.000	1.476	7,38%	20.000	1.986	10%

Capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan dengan capaian pada periode TW II yaitu 1986 **orang** hal ini berarti belum mencapai capaian kinerja pada Tahun 2024. ditargetkan pada Triwulan III sudah terlaksana beberapa rangkaian kegiatan sehingga dapat memenuhi target dalam indikator.

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2024 yaitu senilai Rp 15.650.000.000- dengan rincian Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Rencana pelaksanaan Puncak Pekan Keselamatan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2024 rencananya akan digelar pada bulan September 2024 sehingga diharapkan dari pelaksanaan kegiatan puncak PNKJ akan menambah peserta / masyarakat yang tersosialisasi keselamatan jalan akan meningkat. Ditambah dengan pelaksanaan PKJ di 33 BPTD kelas II dan Kelas III di seluruh Indonesia diharapkan dapat mendongkrak capaian kinerja dimasa datang. selain itu, upaya untuk meningkatkan capaian kinerja adalah dengan penjadwalan pelaksanaan PKJ di BPTD pada tahun anggaran berjalan.

Selain itu untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang diharapkan sosialisasi keselamatan tidak hanya melalui kegiatan pekan keselamatan jalan saja, namun dapat dilakukan dengan sosialisasi keselamatan melalui media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.

IKK07

Jumlah fasilitas
pengujian kendaraan
bermotor yang sesuai
standar internasional
(UN-ECE)

Capaian TW II Indikator IKK07

Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.

Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor merupakan jumlah fasilitas/alat pengujian tipe kendaraan yang terdapat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan bermotor (BPLJSKB) yang telah mengikuti standar UN-ECE. UN-ECE merupakan standar keselamatan kendaraan yang disepakati Komisi Ekonomi PBB dan penerapan standar tersebut di Indonesia telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Dikarenakan pada **TW II Tahun 2024 tidak ada penambahan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK07 adalah sebagai berikut :

Realisasi TW II

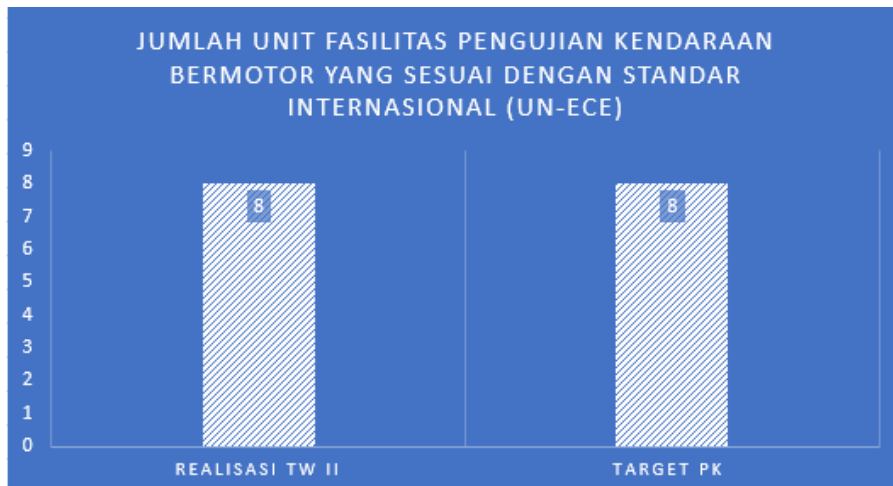
8

Unit

IKK07 = Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE) dalam n tahun

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Pada triwulan II Capaian Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE) dalam n tahun adalah **8 unit** Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebanyak **8 Unit** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK07 Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE) dalam n tahun.



Analisa Keberhasilan /Kegagalan

Dikarenakan pada **TW II Tahun 2024 tidak ada penambahan pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)** maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK07 adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) dengan capaian pada periode TW II yaitu **8 unit** hal ini berarti capaian kinerja sebesar **100%** dibandingkan dengan target pada Revisi Perjanjian Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = 8/8 \times 100 \% = 100\%$$

Capaian Kinerja
TW II terhadap
Target Kinerja

100%

Kode	Indikator	TW II		
		Target	Realisasi	Capaian
IKK 07	Jumlah Unit fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (UN-ECE)	8	8	100,00%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Renstra Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja indikator Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) TW II Tahun 2024 sebanyak 8 Unit jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Sarana Transportasi Jalan 2020-2024 sebanyak 14 Unit maka capaian kinerja mencapai 47%. pencapaian digambarkan pada grafik dibawah :



IKK08

Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Capaian TW II Tahun 2024 Indikator IKK08

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah komulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Untuk menghitung capaian indikator Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK08 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun n}}{\text{(Jumlah Pemda dan UPUBKB Swasta (APM))}} \times 100 \%$$

Dari jumlah kabupaten dan kota serta pengujian swasta yang ada sebanyak **516 Kab/Kota** sedangkan Jumlah komulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan akhir September tahun 2023 adalah sebanyak **359 UPUBKB** sehingga Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

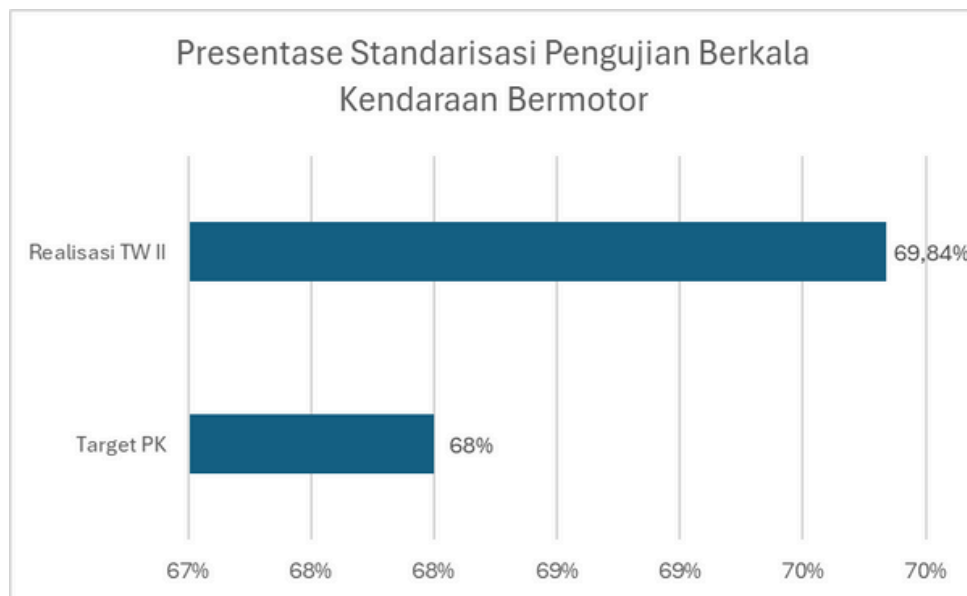
$$IKK08 = (359/516) \times 100\% = 69,84\%$$

Realisasi TW III

69,84%

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada akhir triwulan II tahun 2024 adalah **69,84%**. Jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar **68%** maka pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK08 Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Transportasi Jalan Tahun 2024.



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Dasar Hukum :

Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi fasilitas pengujian kendaraan bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa kegiatan dengan mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

- PM Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- PM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1527 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perdirjen No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Angka Penyebut :

Jumlah Pemda 514 Kab/Kota dan 2 UPUBKB milik Swasta.

Angka Pembilang :

Jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik Pemda (Kab/Kota) dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan Tahun ke n (2023). Dan sampai dengan Tahun 2024 jumlah UPUBKB yang telah terakreditasi sebanyak 359 UPUBKB.

Faktor Keberhasilan :

Adapun hal hal yang mendukung keberhasilan tercapainya target kinerja diatas antara lain :

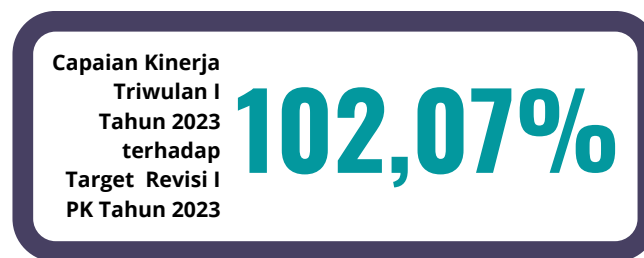
1. Pelaksanaan beberapa kegiatan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan yaitu akreditasi UPUPKB, monitoring dan evaluasi UPUBKB.
2. Membuat suatu kebijakan dimana Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang diijinkan beroperasi harus sudah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga hal ini memaksa Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pembenahan baik dari segi administrasi maupun teknis untuk proses pengajuan permohonan akreditasi UPUBKB.
3. Membuat kebijakan terkait Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dimana setiap pengujian sudah tidak lagi menggunakan buku uji dan juga melakukan peningkatan spek daripada BLUe untuk peningkatan kualitas dan level keamanan.

Capaian :

Realisasi dari Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2024 adalah sebesar 69,84%.

Capaian kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = 69,84\% / 68\% \times 100\% = 102,07\%$$



Kegiatan Real yang mendukung indikator ini antara lain :

1. Pengadaan Secure Access Module (SAM)
2. Pencetakan Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor
3. Perawatan dan Pengkalibrasian Alat kalibrasi
4. Pencetakan Sertifikat Kalibrasi, Stiker Tanda Kalibrasi dan Sertifikat Akreditasi
5. Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala
6. Pengadaan Alat Kalibrasi untuk Alat uji ketebalan asap
7. Pengadaan Alat Kalibrasi untuk Alat uji rem
8. Akreditasi UPUBKB
9. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)
10. Monitoring Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
11. Monitoring dan Evaluasi UPUBKB

Anggaran IKK08 :

Anggaran terkait Indikator Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 yaitu senilai **Rp 74.036.304.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp. 20.772.387.554,-** atau **28,06%.**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala	66.000.000.000	19.701.000.000	29,85%
2	Pengadaan Hardware Secure Module (HSM)	3.036.304.000	0	0,00%
3	Pencetakan Stiker Rampcheck Lebaran	200.000.000	199.800.000	99,90%
4	Pencetakan Stiker Rampcheck Natal dan Tahun Baru	200.000.000	0	0,00%
5	Optimasi Integrasi SIM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500.000.000		0,00%
6	Pengadaan Alat Verifikator Spesifikasi BLUE	200.000.000	0	0,00%
7	Pencetakan Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor	400.000.000	178.932.000	44,73%
8	Pencetakan Sertifikat Kalibrasi, Stiker Tanda Kalibrasi dan Sertifikat Akreditasi	200.000.000	0	0,00%
9	Perawatan dan Pengkalibrasian Alat kalibrasi	1.000.000.000	0	0,00%
10	- Pengadaan Secure Access Module (SAM)	200.000.000	198.690.000	99,35%
11	Akreditasi UPUBKB	1.000.000.000	146.035.124	14,60%
12	Monitoring dan Evaluasi UPUBKB	500.000.000	130.552.980	26,11%
13	Monitoring Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	600.000.000	217.377.450	36,23%
TOTAL		74.036.304.000	20.772.387.554	28,06%

Capaian Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada periode Triwulan II yaitu 102,07%.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain :

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang proses dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan Akreditasi UPUBKB baik permohonan baru maupun perpanjangan dan mendorong UPUBKB yang sertifikat akreditasinya sudah habis masa berlakunya untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi.
2. Dilakukannya akreditasi online untuk permohonan akreditasi perpanjangan yang bekerjasama dengan BPTD Setempat. Hal ini juga menjadi salah satu upaya Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk mempercepat proses permohonan akreditasi perpanjangan..
3. Mendukung program pemberian DAK alat uji kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota.



IKK09

Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Definisi Indikator Kinerja

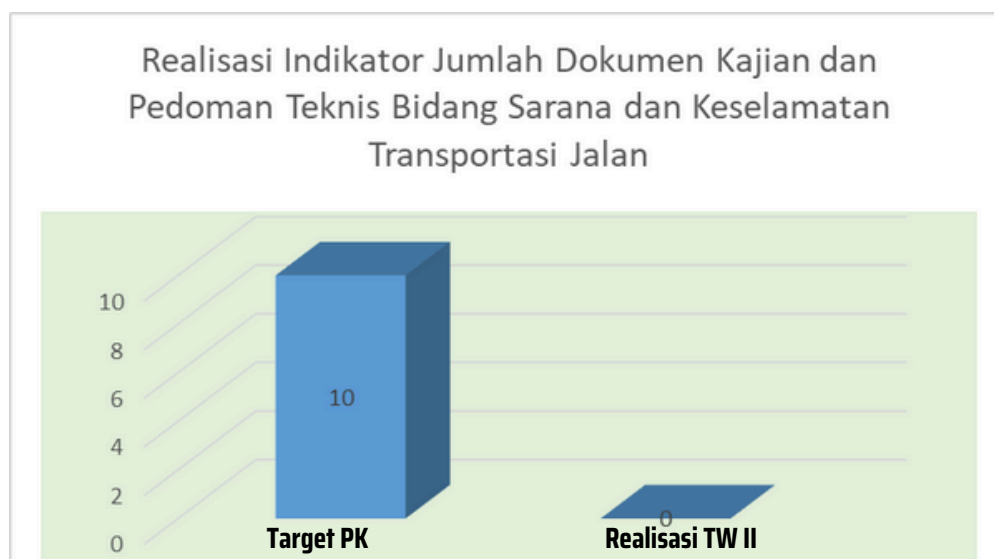
Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah kegiatan studi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK09} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}{\text{Target}}$$

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Capaian Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 Triwulan II sebesar 0 Dokumen jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 10 Dokumen, dikarenakan belum terselesainya kegiatan studi.



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sehingga dalam hal ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan kajian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyusunan NSPK.

Pada tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan studi atau penyusunan dokumen teknis sebanyak 10 kajian.

Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 triwulan II adalah sebanyak 3 dokumen. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2023 triwulan III terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 3 dokumen adalah 0 %

$$\% \text{ Capaian} = 0/10 \times 100 \% = 0,0 \%$$



Adapun anggaran terkait Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 yaitu senilai **Rp 7.950.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp 139.049.700-** atau **1,75%.**

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dipercepat proses pengadaan jasa konsultansinya dengan harapan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian lebih efektif. Dan harapan ke depan Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2024 untuk dapat dijadikan pedoman teknis dalam peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2024 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar **9 dokumen** jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 adalah 0 dokumen sampai triwulan II tahun 2024 hal ini di karenakan beberpa kegiatan studi baru berkontrak di bulan mei dan juni sehingga posisi saat ini belum terdapat realisasi capaian kinerja Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan. Posisi saat ini beberapa dokumen kajian sudah mulai pembahasan laporan pendahuluan. Realisasi capaian kinerja Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan akan terrealisasi pada bulan Oktober / November 2024.

IKK10

Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

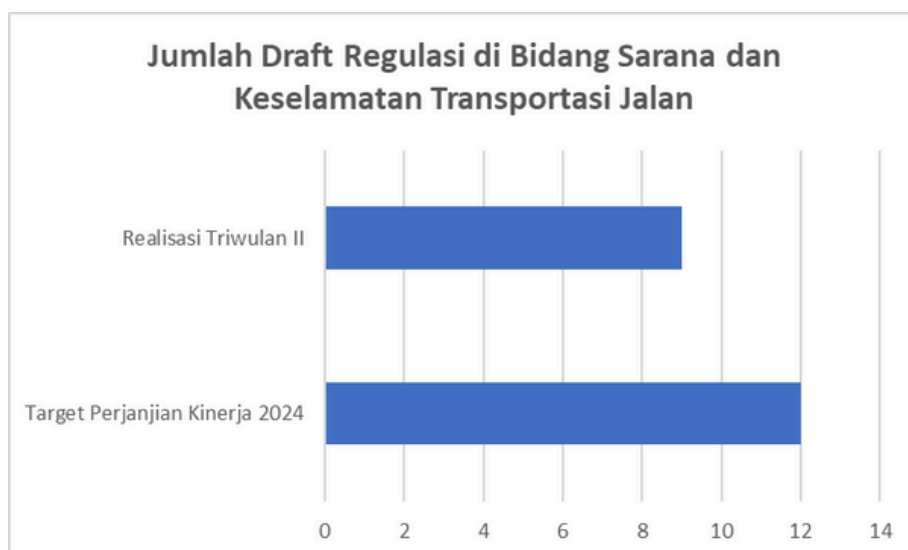
Definisi Indokator Kinerja

Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah draf regulasi atau peraturan yang disusun oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK10} = \frac{\text{Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}{\text{Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}$$

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Capaian Jumlah Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 Triwulan II sebesar 12 **Draf** jika dibandingkan dengan target PK awal sebesar 9 **Draf** maka pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sehingga dalam hal ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan penyusunan draft regulasi dalam rangka melaksanakan tugas penyusunan NSPK. Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 triwulan II adalah sebanyak 9 **Draf** dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

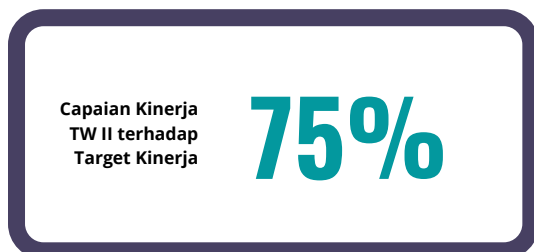
Sampai dengan bulan Juni 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah menyelesaikan 9 draft peraturan sehingga capaian TW III adalah sebagai berikut :

IKK10 = 9 Draf



Capaian Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan capaian pada periode TW II yaitu **9 draf** dari target 12 draft hal ini berarti capaian kinerja sebesar **75 %**.

% Capaian = $9/12 \times 100 \% = 75 \%$



Adapun anggaran terkait Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 yaitu senilai **Rp 1.120.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp 600.980.140,-** atau **53,66 %**.

Draft Regulasi 2024 Dit. STJ :

1. Draft Perubahan Atas PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
2. Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Klasifikasi Perusahaan Karoseri
3. Draft Perubahan Atas PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
4. Draft Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Mitigasi Tanggap Darurat Terhadap Kendaraan Listrik Berbasis Baterai
5. Draft Keputusan Dirjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan
6. RPM terkait RAK Sudah Selesai Pembahasan Sedang Dimintakan Masukkan Dan Koreksi Kembali Kepada Seluruh Direktorat Darat
7. RPM terkait Teknis Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan
8. Perdirjen Tata cara penyelenggaraan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor keliling
9. Tata Cara Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	Focus Group Discussion Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	300.000.000	3.250.000	1,08%
2	Penyusunan NSPK Bidang Uji Berkala	300.000.000	0	0,00%
3	Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kemitraan dan Promosi	250.000.000	70.335.000	28,13%
4	Penyusunan NSPK Bidang Uji Tipe	300.000.000,00	133.013.500	44,34%
5	Pembahasan Terpadu Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000	48.566.000	24,28%
6	Penyusunan NSPK Bidang Manajemen Keselamatan	300.000.000	92.557.350	30,85%
TOTAL		1.650.000.000	347.721.850	21,07%

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pembahasan terkait dengan draf peraturan - peraturan lebih efektif dengan menggunakan anggaran yang ada



IKK11

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 Indikator IKK11

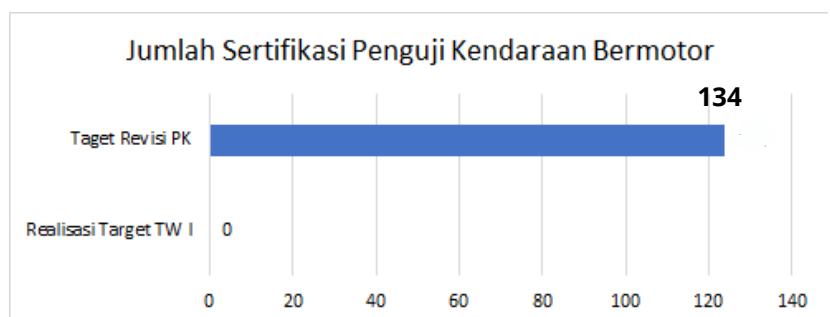
Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jumlah sertifikasi penguji kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui kegiatan Peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor (Diklat) dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan BPSDM Perhubungan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK11} = \frac{\text{Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor pada tahun } n}{\text{Target}} \times 100$$

Hingga akhir bulan Maret Tahun 2024, Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi dan Peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor sehingga capaian kinerja Tahun 2024 adalah **0 Sertifikat**

Target VS Realisasi

Realisasi Indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar **114 Sertifikat** jika dibandingkan dengan target Revisi PK 2023 sebesar **134 Sertifikat** maka pencapaian ini digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Analisa Keberhasilan

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2024 adalah sebanyak 0 sertifikat. Dengan demikian, capaian Indikator Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 0%.

$$\% \text{ Capaian} = 0/123 \times 100 \% = 100\%$$

**Capaian Kinerja
Tahun 2024
terhadap
Target Kinerja**

0%

Kode	Indikator	TW II		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK11	Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan	123	0	0,00%

Adapun anggaran terkait Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2024 yaitu senilai **Rp.1.630.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan I telah terealisasi sebanyak **Rp.0,-** atau **0%.**

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	Rp950,000,000	Rp0.00	0.00%
2	Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	Rp680,000,000	Rp0.00	0.00%
	Total	Rp1,630,000,000		

Hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja indikator Jumlah sertifikasi penguji kendaraan bermotor antara lain :

1. Adanya alokasi anggaran kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor sehingga memberikan kesempatan penguji kendaraan bermotor untuk dapat meningkatkan kompetensi yang mereka miliki.
2. Besarnya antusiasme dari para penguji dari Seluruh Indonesia untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki melalui keikutsertaan pada kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan uji kompetensi penguji kendaraan bermotor.
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan baik dari segi pengalokasian anggaran pengiriman diklat maupun dukungan moril kepada pegawainya untuk meningkatkan kompetensinya.
4. Koordinasi yang baik antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang antara lain :

1. Menyusun jadwal dan mempercepat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
2. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di Seluruh Indonesia tentang pentingnya meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor demi peningkatan kualitas pelayanan bidang pengujian kendaraan bermotor
3. Meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan baik dalam hal kurikulum/materi diklat maupun proses pelaksanaan uji kompetensinya.



IKK12

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK11 =
$$\frac{\text{Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}{\text{Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n}$$

Perbandingan Realisasi TW II dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Dit. Sarana TJ Tahun 2024

Pelaksanaan beberapa Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan telah dilaksanakan di beberapa daerah dan sampai dengan Juli 2024 sebanyak **1425 peserta**



Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana transportasi jalan. sehingga pada tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa bimbingan teknis sebagai berikut

Kegiatan		Jumlah Peserta
1	Penyertaan Pegawai Dalam Pelatihan dan Diklat	0
2	Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor	0
3	Pembinaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	80
4	Pembinaan Teknis Petugas Kalibrasi BPTD	0
5	Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala	0
6	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	100
7	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	85
8	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang	48
9	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional	0
10	Peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan	9
11	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan	0
12	Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun	0
13	Surveillance ISO Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Rancang Bangun	0
14	Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	0
15	Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum	630
16	Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan	418
17	Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU	60
TOTAL PESERTA		1.428

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 triwulan II adalah sebanyak 1.428 **orang**. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah **101,79%**.

IKK12 = 1.428
Realisasi TW I

1.428
Orang

% Capaian = 1.428/1.361 x 100 % = 101,79%

Capaian Kinerja
TW II Terhadap
Target Kinerja

101,79%

Adapun anggaran terkait Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	Penyertaan Pegawai Dalam Pelatihan dan Diklat	300.000.000	7.444.002	2,48%
2	Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor	400.000.000	0	0,00%
3	Pembinaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	393.560.000	295.232.319	75,02%
4	Pembinaan Teknis Petugas Kalibrasi BPTD	406.440.000	0	0,00%
5	Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala	400.000.000	0	0,00%
6	Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	500.000.000		0,00%
7	Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	500.000.000	254.542.370	50,91%
8	Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang	400.000.000	235.975.208	58,99%
9	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional	800.000.000	0	0,00%
10	Peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan	500.000.000	180.819.000	36,16%
11	Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan	400.000.000	0	0,00%
12	Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun	300.000.000	0	0,00%
13	Surveillance ISO Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Rancang Bangun	400.000.000	0	0,00%
14	Pembinaan Teknis Petugas Pemeriksa Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	400.000.000	0	0,00%
TOTAL		6.100.000.000	974.012.899	15,97%

Adapun anggaran terkait Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan senilai **Rp 6.100.000.000,-** dan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II telah terealisasi sebanyak **Rp 974.012.899,-** atau **15,97%**.



SK5

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Dukungan teknis transportasi darat. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKK1

Kualitas penyelenggaraan
dukungan teknis transportasi
darat

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan dispilin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan 1 (satu) IKK yaitu Indeks Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah

KODE	INDIKATOR	
SK5	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
IKK1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
NO	Target/Realisasi/Capaian	QI
1	Target	89
2	Realisasi	87
3	Capaian	97,75%

Analisa Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki tugas melaksanakan bimbingan teknis di bidang sarana transportasi jalan. sehingga pada tahun 2024 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa bimbingan teknis sebagai berikut

Periode TW II **penilaian terkait dengan indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis** dari Sesditjen Perhubungan Darat Transportasi Darat maka capaian Kinerja untuk Indikator IKK1 adalah sebagai berikut :



Adapun anggaran terkait indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 24.608.136.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan TW II adalah sebesar **Rp. 2.204.600.479** atau **8,96 %**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan teknis transportasi darat diperoleh dari:

- Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan dengan bobot nilai sebesar 25;
- Indeks profesionalisme ASN dengan bobot nilai sebesar 25;
- Tingkat pengelolaan keuangan dengan bobot nilai sebesar 25;
- Tingkat pengelolaan hukum dan humas dengan bobot nilai sebesar 25.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat berhasil karena adanya dukungan Pimpinan unit kerja dalam hal penyediaan anggaran untuk penyusunan dokumen, peningkatan kompetensi SDM, kontrol terhadap pencapaian daya serap anggaran, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan isu-isu di tahun 2024. Sehingga capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25
1	SAKIP	
a	Rencana Strategis (Renstra)	3
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2
c	Perjanjian Kinerja (PK)	2
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2
e	Input Aplikasi e-Performance	1
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	3
2	Input Aplikasi e-Planning	10
B	Indeks Profesionalisme ASN	25
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6
2	Kompetensi	10
3	Kinerja	8
4	Disiplin	1
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	25
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	5
D	Tingkat Pengelolaan Hukum dan Humas	25
1	Penyusunan NSPK	7
2	Pengelolaan Informasi Publik	6
3	Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama	6
4	Pelaksanaan Advokasi Hukum	6
TOTAL NILAI		100

Capaian Realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
=25 + 25 + 20 + 17 = 87

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 Triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Sehingga : $\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi 2024} / \text{Target 2024}) \times 100\%$

$$\% \text{ Capaian} = (87/89) \times 100\% = 97,75 \%$$

Faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan Pimpinan unit kerja dalam hal penyediaan anggaran untuk penyusunan dokumen, peningkatan kompetensi SDM, kontrol terhadap pencapaian daya serap anggaran, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan isu-isu di tahun 2024.
- Adanya pengawasan dari pimpinan terkait pelaksanaan Dukungan Teknis Transportasi Darat yang dapat dilakukan dengan secara online melalui aplikasi e-performance, e-monitoring, e-SAKIP review, dll;

Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya beberapa refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun anggaran terkait indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 24.608.136.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan TW II adalah sebesar Rp. **9.020.791.212** atau **36,66 %**

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat timeline penyusunan dokumen SAKIP, input aplikasi e-planning dan pelaksanaan penyerapan anggaran;
2. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan teguran atau sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kinerjanya;
3. Berkoordinasi secara rutin dengan instansi dan unit kerja terkait penyusunan dokumen SAKIP, e-Planning dan pengelolaan anggaran.
4. Melakukan kajian terhadap isu perkembangan atau permasalahan transportasi umum yang akan dijadikan kebijakan.
5. Melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan yang sudah terbit terhadap relevansi pada kondisi saat ini.



SP02

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai kontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

IKP01 Indeks RB Kementerian
Perhubungan

IKP01

Indeks RB Kementerian Perhubungan

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Capaian TW I Indikator IKP01

Penilaian Indeks RB Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Kemen PAN RB dan diukur dari pelaksanaan program reformasi Birokrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Dikarenakan untuk periode TW I untuk indikator Indeks RB Kementerian Perhubungan masih dalam evaluasi oleh Kemen PAN RB maka capaian Kinerja untuk Indikator IKP01 adalah sebagai berikut :

Adapun anggaran terkait Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 279.698.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan Maret TW I adalah sebesar **Rp. 53.246.000** atau **19,04 %**

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP salah satunya yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah :

Realisasi TW I

77,45
Nilai

Sasaran Program / Indikator Kinerja Program		
SP02	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang baik	
IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	
NO	Target/Realisasi/Capaian	QI
1	Target	80,5
2	Realisasi	77,45
3	Capaian	96,21%

Capaian nilai evaluasi RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada Triwulan I masih merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya. Dimana nilai tersebut merupakan gambaran pencapaian atas pemenuhan komponen dan sub-komponen pada tabel pembobotan. Untuk lebih jelasnya rincian hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,5	2,5
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	95,46	5,57
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	82,92	1,66
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	5	2
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,2	2,56
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	78,89	3,16
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	98,07	1,96
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	68,87	1,38
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94,12	1,88
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	2,85	1,43
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	3	0,9
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	90,63	1,36
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	76,44	1,15
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1,5	2,84	0,85
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	79,64	1,59
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	290,5	2,83
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,7	1,41
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	82,21	1,23

21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3,71	6,68
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	2	98,35	1,97
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU	8	100	6,31
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	77,8	3,11
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	58,8	2,35
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	61,58	6,16
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	94,25	7,54
29	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8		
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8		
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8	0,3	0,3
32	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8		
33	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0,8		
34	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2		
35	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2		
36	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2	0,19	0,19
37	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	85,36	1,02
38	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1,2		
Jumlah Total				110		77,45

Berdasarkan Realisasi Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 atas evaluasi oleh tim evaluator KemenPANRB adalah diperoleh nilai sebesar 77,45, yang didapat atas nilai evaluasi pada tahun sebelumnya pada tahun 2023, dan evaluasi pada tahun 2023 masih dalam proses perbaikan Road Map Reformasi Birokrasi pada tingkat Kementerian hingga keluarnya nilai evaluasi Reformasi Birokrasi. Nilai tersebut merupakan nilai RB pada tingkat Kementerian Perhubungan dan level Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengikuti nilai Kementerian Perhubungan. Sehingga nilai Indeks RB Kementerian Perhubungan masih menggunakan nilai pada tingkat kementerian yaitu sebesar 77,45

Analisa Keberhasilan / Kegagalan

• Dasar Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan RI memiliki dasar hukum sebagai dasar acuan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
3. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 89 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024 .

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), diarahkan dalam 4 (empat) strategi, diantaranya:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan secara nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE yang terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem terintegrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

• Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Target awal IKP Indeks RB Kementerian Perhubungan Tahun 2024 senilai 80,500 diperoleh dari Renstra 2020-2024 dengan berdasarkan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat renstra 2020-2024. Sepanjang triwulan I tahun 2024 tidak terdapat perubahan target Indeks RB Kementerian Perhubungan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .

Pelaksanaan penilaian capaian Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat menggunakan nilai indeks RB Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB

• Realisasi Kinerja

.Nilai Evaluasi memiliki besaran 100% dari nilai capaian RB General dan 10% dari nilai capaian RB Tematik, dimana hasil tersebut didapat berdasarkan penilaian dari instansi pembina atas capaian beberapa aspek yang dikoordinasi oleh Leading Sector Kementerian Perhubungan.

Sehingga:

Berdasarkan realisasi nilai reformasi birokrasi tingkat Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 77,450, menjadi nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori 'BB' dengan predikat 'Sangat Baik', dengan interpretasi secara instansional Kementerian Perhubungan khususnya Ditjen Perhubungan Darat mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks Reformasi Birokrasi), menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

• **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks RB Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target Indeks RB Kementerian Perhubungan Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \% \\ \% \text{ Capaian} &= 77,450 / 80,500 \times 100\% = 96,21\% \end{aligned}$$

Dimana angka 80,500 didapat target rencana strategis Tahun 2024, sedangkan angka 77,450 didapat dari realisasi tercapai dari evaluasi reformasi birokrasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPANRB, yang didapat berdasarkan nilai RB General dan nilai RB Tematik Kementerian Perhubungan. Ketercapaian hasil tercapai 96,21% dari nilai yang ditargetkan, hal ini didukung adanya perbaikan dari hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun sebelumnya, walaupun belum mencapai nilai yang ditargetkan. Selisih nilai tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kembali untuk tercapainya target pada tahun berikutnya.

• **Faktor-Faktor Keberhasilan**

Faktor-faktor keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya perubahan Roadmap reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024 sebagai acuan dan masukan terhadap roadmap reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan
- Adanya evaluasi kelembagaan yang berdasar atas ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, dimana dalam perkembangannya mengubah tingkat penataan UPT Balai Pengelola Transportasi Darat, terbentuknya UPT Kantor Otoritas Pelabuhan Danau Toba dan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

- Adanya antusias, pemahaman dan kontribusi setiap pemangku jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam perencanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- Indikator kinerja individu sebagai turunan dari kinerja organisasi telah dijabarkan secara optimal mengacu kepada PermenPANRB No.6 Tahun 2022, sehingga telah dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- Penguatan pengawasan telah ditegakkan dengan meminimalisir adanya pungli/ gratifikasi hingga unit terkecil Ditjen Perhubungan Darat, dibuktikan dengan sosialisasi rutin serta keikutsertaan unit kerja dalam menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Adanya kemauan dan kemampuan Ditjen Perhubungan Darat dalam meningkatkan pelayanan publik untuk menciptakan budaya pelayanan prima pada setiap pelayanannya, dimana telah tersusunnya Standar Pelayanan pada setiap unit kerjanya, serta adanya tindak lanjut atas masukan dalam survei kepuasan masyarakat.

• **Faktor Kendala**

Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon I sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya
- Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan;
- Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron teridentifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja;
- Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara masif belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas;
- Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengukur tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan
- Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

Adapun anggaran terkait Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 279.698.000** dengan realisasi anggaran samapai dengan Maret TW I adalah sebesar **Rp. 3.120.000** atau **1,12 %**

Kegiatan - kegiatan real yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam keberhasilan IKP Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 adalah kegiatan penyusunan dokumen SAKIP dan SPIP.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan penguatan dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas
- Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat khususnya di level unit kerja;
- Meningkatkan penerapan SPBE di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
- Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan dan menyusun peta kompetensi sebagai dasar penetapan rotasi/mutasi individu;
- Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;

- Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
- Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat unit pelayanan publik dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas layanan.



Realisasi Anggaran

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TW II TAHUN 2024
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 136.694.440.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp	69.059.818.000	50,52%
PNBP	Rp	67.634.622.000	49,48%
Total	Rp	136.694.440.000	100,00%

Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Barang	Rp	131.462.336.000	96,17%
Belanja Modal	Rp	5.232.104.000	3,83%
Total	Rp	136.694.440.000	100,00%

Pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar **Rp 136.694.440.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

RM	Rp	69.059.818.000	50,52%
PNBP	Rp	67.634.622.000	49,48%
Total	Rp	136.694.440.000	100,00%
Belanja Barang	Rp	131.462.336.000	96,17%
Belanja Modal	Rp	5.232.104.000	3,83%
Total	Rp	136.694.440.000	100,00%

Revisi dan Refocusing Anggaran Tahun 2024

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Direktorat Sarana Transportasi Jalan melakukan 9 kali revisi anggaran. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa penghematan. Adapun revisi anggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Rincian Revisi Per Sumber Dana s.d Triwulan II TA. 2024

	SUMBER DANA		JUMLAH
	RM	PNBP	
PAGU AWAL	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-I	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-II	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-III	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-IV	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-V	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-VI	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-VII	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-VIII	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000
REVISI KE-IX	69.059.818.000	67.634.622.000	136.694.440.000

Rincian Revisi per Jenis Belanja s.d. Triwulan II TA. 2024

	JENIS BELANJA		JUMLAH
	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-I	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-II	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-III	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-IV	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-V	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-VI	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-VII	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-VIII	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000
REVISI KE-IX	131.462.336.000	5.232.104.000	136.694.440.000

Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja s.d. Triwulan II TA. 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
BELANJA BARANG	131.390.436.000	-	131.390.436.000	-	131.390.436.000
• RM	63.755.814.000	-	63.755.814.000	-	63.755.814.000
• PNB	67.634.622.000	-	67.634.622.000	-	67.634.622.000
BELANJA MODAL	5.232.104.000	-	5.232.104.000	-	5.232.104.000
• RM	5.232.104.000	-	5.232.104.000	-	5.232.104.000
• PNB					
TOTAL	136.622.540.000	-	136.622.540.000	-	136.622.540.000

Realisasi Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALISASI	%		REALISASI	%
352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	136.694.440.000	136.694.440.000	1.959.971.126	1,43%	136.694.440.000	35.781.455.198	26,18%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	123.423.508.000	123.423.508.000	1.312.558.674	1,06%	123.423.508.000	31.904.085.304	25,85%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	6.000.000.000	6.000.000.000	-	0,00%	6.000.000.000	143.079.000	2,38%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	117.423.508.000	117.423.508.000	1.312.558.674	1,12%	117.423.508.000	31.761.006.304	27,05%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	13.270.932.000	13.270.932.000	647.412.452	4,88%	13.270.932.000	3.877.369.894	29,22%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan	495.800.000	495.800.000	101.675.190	20,51%	495.800.000	261.667.190	52,78%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	12.775.132.000	12.775.132.000	545.737.262	4,27%	12.775.132.000	3.615.702.704	28,30%

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TRIWULAN I)	REALISASI (TRIWULAN I)		PAGU ALOKASI (TRIWULAN II)	REALISASI (TRIWULAN II)	
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
1.	Belanja Barang	131.462.336.000	1.858.295.936	1,41%	131.462.336.000	35.519.788.008	27,02%
2.	Belanja Modal	5.232.104.000	101.675.190	1,94%	5.232.104.000	261.667.190	5,00%
Total		136.694.440.000	1.959.971.126	1,43%	136.694.440.000	35.781.455.198	26,18%

Analisis Dana yang Belum Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang belum terserap oleh unit kerja per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU AKHIR	REALISASI	Sisa Pagu
		Rp	Rp	
1.	Belanja Barang	131.462.336.000	35.519.788.008	95.942.547.992
2.	Belanja Modal	5.232.104.000	261.667.190	4.970.436.810
Total		136.694.440.000	35.781.455.198	100.912.984.802

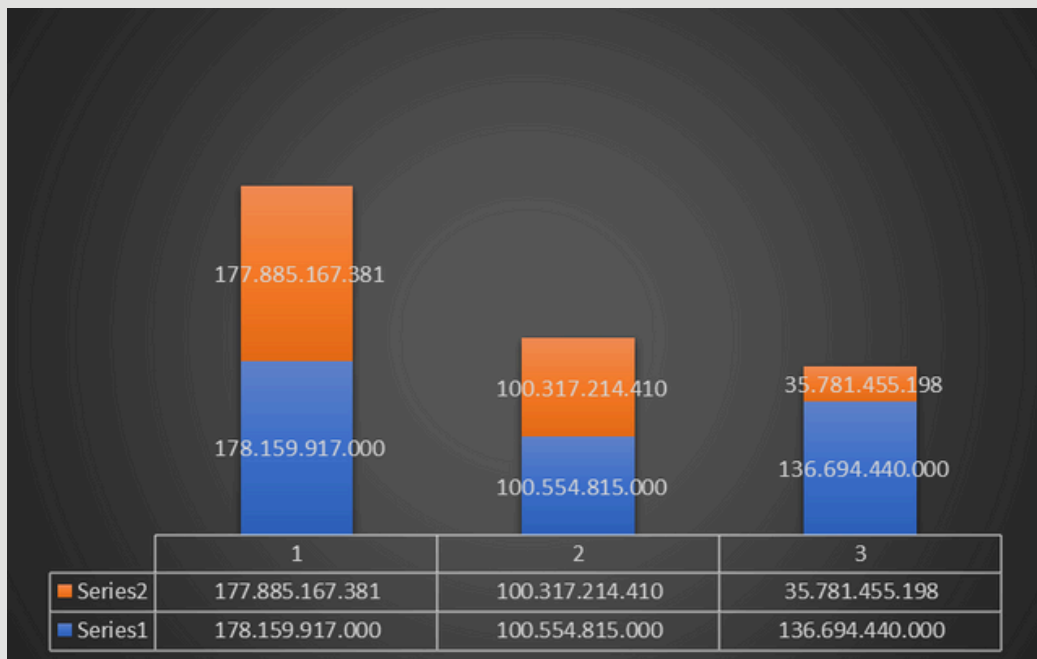
Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	Sisa Pagu
		Rp	Rp	
1.	Rupiah Murni	69.059.818.000	15.667.081.198	53.392.736.802
2.	PNBP	67.634.622.000	20.114.374.000	47.520.248.000
Total		136.694.440.000	35.781.455.198	100.912.984.802

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2022 – 2024 Triwulan II untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2022	145.393.007.000	178.159.917.000	177.885.167.381	99,85%
2	2023	91.902.162.000	100.554.815.000	100.317.214.410	99,76%
3	2024	136.694.440.000	136.694.440.000	35.781.455.198	26,18%

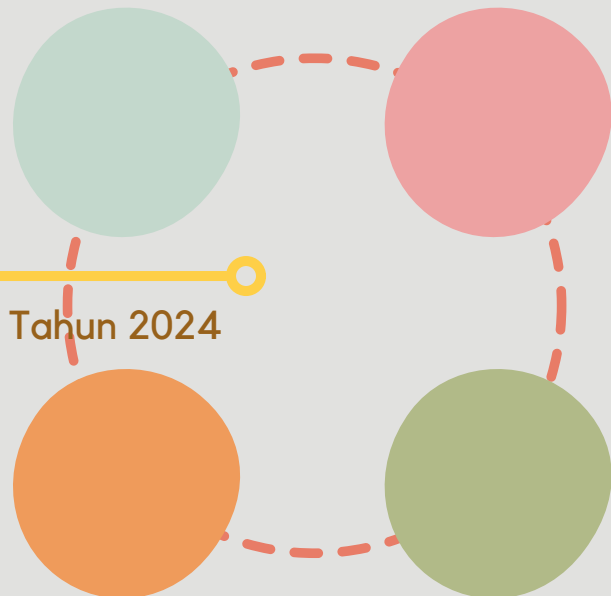


Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan realisasi setiap tahunnya, pada tahun **2022** anggaran yang terserap sebesar **Rp. 177.885.167.381,-** dari pagu akhir **Rp. 178.159.917.000,-** atau mencapai **99,85%**. Pada Tahun 2023 anggaran yang terserap sebesar Rp. **100.317.214.410,-** dari pagu akhir **Rp. 100.554.815.000,-** atau mencapai **99,76%**. Pada Tahun **2024 Triwulan II** anggaran yang terserap sebesar **Rp. 35.781.455.198,-** dari pagu akhir **Rp. 136.694.440.000,-** atau mencapai **26,18%**.



Bab III Penutup

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024
Direktorat Sarana Transportasi Jalan



RINGKASAN CAPAIAN

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan I Tahun 2024 ini terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Direktorat Sarana Transportasi. Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan terealisasi sebesar **0,015 (target 0,008)**
- Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) terealisasi sebesar **175 perusahaan (target 200 perusahaan)**
- Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional terealisasi sebesar **332 lokasi (target 422 lokasi)**
- Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar **1.986 orang (target 20.000 orang)**
- Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) terealisasi sebesar **8 unit (target 8 unit)**
- Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar **69,64 % (target 68 %)**
- Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **0 Dokumen (target 10 Dokumen)**
- Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **9 draf (target 12 draf)**
- Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar **0 sertifikat (target 134 sertifikat)**

- Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terealisasi sebesar **1.425 orang (target 1.361 orang)**
- Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar **87 Nilai (target 89 nilai)**
- Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar **77,45 (target 80,500)**
- Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Direktorat Sarana Transportasi Jalan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan transportasi jalan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET BULAN-6	REALISASI BULAN-6	CAPAIAN BULAN-6	Evaluasi	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA							
1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,000	0,075	12,50%	Tidak Tercapai	1. Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; 2. akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; 3. akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK; 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara mengukuhkan baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); 5. Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan; 6. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat; 7. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khorut (B3); 8. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan; 9. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; 10. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; 11. Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; 12. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; 13. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3); 14. untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi perijinan angkutan umum (SPIONAM) sehingga pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal; 15. Optimalisasi aplikasi Terminal Online Sistem (TOS) untuk pengawasan keberangkatan	MANAJEMEN KESELAMATAN
		Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALEN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	174	175	100,57%	TERCAPAI	1. akan melaksanakan Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) dan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum kepada perusahaan angkutan umum dalam Menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum, melaksanakan monitoring pembinaan keselamatan angkutan umum; 2. Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertujuan agar sumber daya manusia untuk penilai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) bertambah banyak sehingga penilaian dokumen SMK dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih cepat dengan sumber daya manusia yang kompeten; 3. Seiring dengan bertambahnya sumber daya manusia penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum maka Kegiatan Pembinaan Teknis penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum perlu dilaksanakan sehingga manajemen keselamatan dan pengelolaan resiko kecelakaan dalam suatu perusahaan dapat terwujud.	MANAJEMEN KESELAMATAN
		Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	325	332	102,15%	Belom Tercapai	1. Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang salah satunya dengan meningkatkan koordinasi dengan BPTD serta peran ahli BPTD untuk melakukan inventarisasi lokasi pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan serta melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan kepada BPTD; 2. selain kegiatan diatas Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui Subdit Manajemen Keselamatan akan membuat aplikasi SEMK yang mana aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah pengawasan dan perencanaan pembangunan ZoSS, RASS, dan Implementasi Batas Kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD sehingga data yang	MANAJEMEN KESELAMATAN
		Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1300,00	1386	104,53%	Belum Tercapai	1. Dalam Upaya meningkatkan capaian pelaksanaan Pelan Keselamatan Nasional Transportasi Darat kepada Pelajar (Usia Dini, SD, SMP dan SMA), Tenaga pendidik (TK/Paud), komunitas dan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di Pusat dan BPTD; 2. Selain itu untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang diharapkan sosialisasi keselamatan tidak hanya dapat dilakukan secara offline, namun dapat dilakukan dengan sosialisasi keselamatan dan mengkampanyekan keselamatan Transportasi Darat melalui media sosial dalam bentuk Motion graphic, kartun yang dapat dijangkau dan lebih menarik untuk di sampaikan kepada masyarakat lebih banyak.	Subdit Promotiva
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	8	8	100,00%	TERCAPAI	saat ini sedang dalam proses pembangunan Proving Ground Fase 1, dimana rencananya akan beroperasi pada bulan april 2025. Pada pembangunan Proving Ground Fase 1 terdapat 13 penambahan fasilitas uji tipe, baik dengan metode pengujian indoor maupun outdoor. Dengan adanya Proving Ground tersebut maka hasil pengujian tipe dapat digunakan dan berlaku di seluruh kawasan ASEAN sesuai dengan ASEANMRA	UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
		Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	68	69,84	102,70%	TERCAPAI	1. melakukan sosialisasi kepada Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia tentang proses serta persyaratan dalam pelaksanaan akreditasi, baik Akreditasi Pengujian Baru maupun Perluasan; 2. perlu alokasi anggaran guna mendorong daerah untuk dapat mengajukan akreditasi guna proses percepatan akreditasi di seluruh Indonesia, dimana saat ini jumlah pemerintah daerah yang melakukan pengujian adalah sebanyak 346 daerah dari 514 pemerintah daerah yang ada di Indonesia.	UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
		Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	0	0	0%	BELUM TERCAPAI	Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dipercepat proses pengadaan jasa konsultasinya dengan harapan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian lebih efektif. Dan harapan kedepan Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2024 untuk peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.	SEMUA SUBDIT DAN TU

3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	9	9	100,00%	TERCAPAI	Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan pembahasan terkait dengan draf peraturan - peraturan lebih efektif dengan menggunakan anggaran yang ada	SEMUA SUBDIT DAN TU
		Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	0	0	#DIV/0!	TERCAPAI	guna meningkatkan jumlah serta meningkatkan kompetensi tenaga penguji perlu penambahan anggaran guna membuat kegiatan diklat maupun uji kompetensi penguji kendaraan bermotor yang dapat diberikan kepada petugas tenaga penguji baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	
		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1400	1425	101,79%	TERCAPAI	Meningkatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan melaksanakan baik secara fisik maupun secara virtual	SEMUA SUBDIT DAN TU
		Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	100,00%	TERCAPAI	1. Membuat timeline pengurusan dokumen SAKIP, input aplikasi e- planning dan pelaksanaan pengurusan anggaran; 2. Memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan tegun atau sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi kinerjanya; 3. Berkordinasi secara rutin dengan instansi dan unit kerja terkait pengurusan dokumen SAKIP, e-Planning dan pengelolaan anggaran; 4. Melakukan kajian terhadap isu perkembangan atau permasalahan transportasi umum yang akan diadopsi kebijakan; 5. Melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan yang sudah terbit terhadap relevansi pada kondisi saat ini.	SEMUA SUBDIT DAN TU

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78,4	77,45	98,79%	TERCAPAI	1. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dengan melakukan pengujian dan penajaman program-program reformasi birokrasi yang diujikan dalam Road Map reformasi birokrasi Ditjen Perhubungan Darat, agar fokus pada upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas; 2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis dengan meningkatkan kapasitas, menyediakan media komunikasi aktif antar agen perubahan serta melakukan evaluasi atas kinerja agen perubahan dalam rangka meningkatkan budaya kerja dan perubahan mindset di lingkungan KDitjen Perhubungan Darat; 3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi	SEMUA SUBDIT DAN TU
---	--	-----------------------------------	-------	------	-------	--------	----------	--	---------------------

LAMPIRAN

adapun lampiran yang belum terlampir didalam laporan sebagai berikut :

- UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035
- KP.1990/AJ.503/DRJD/2019 tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- KP-DRJD 1913 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penilai SMK PAU
- PM 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
- PM 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

LAMPIRAN

- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan
- 16. PM Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- PM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ.502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang Pedoman Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Secara Elektronik.
- PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

LAMPIRAN

- Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1432/AJ.502/DRJD/2020 tentang Pendelegasian wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur Sarana Transportasi Jalan untuk Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 234 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2020-2024.

beberapa lampiran tersebut dapat diakses melalui website :
https://bit.ly/lmckdit_saranatj



DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2024